

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PETERNAKAN DI KABUPATEN NUNUKAN  
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa  
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**FAUZIAH**

**NIM. 500647358**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Juni 2016  
Yang Menyatakan



(Fauziah)  
NIM. 500647358

**ABSTRACT****ANALYSIS PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH  
BUSINESS DEVELOPMENT AGRIBUSINESS FARMS IN  
THE DISTRICT NUNUKAN**

*(Case Study on Farmers in Sub Mansapa District of South Nunukan Nunukan)*

Fauziah

fauziah1212@gmail.com

*Graduate Studies Program  
Indonesia Open University*

*The development of cattle farming in Nunukan will work optimally when the local government, private and community provide full support. Nunukan regency administration is to be able to open up opportunities for people farmers through local regulations and policies, the provision of facilities and infrastructure, such as roads, manufacture of reservoirs, animal market, as well as the allocation of adequate funds for mentoring farmer groups. Mentoring activity should be done in a sustainable manner, in addition to the local government is also responsible for the ongoing formation for the target groups of farmers in the form of supervision, monitoring, evaluation, and reporting. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation and achievement of community empowerment programs through the development of agribusiness farms in Sub Mansapa District of South Nunukan. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Determination of informants in this study is purposive. Data were collected by using observation, interviews, documentary studies, and literature study. Data analysis technique conducted a qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of the program of community empowerment through the development of agribusiness farms in Sub Mansapa District of Nunukan South Nunukan district has been running well it can be seen from several indicators, namely, mechanisms, dissemination, the aid to the mentoring or counseling been run in accordance with the procedures and rules. The achievement of community empowerment programs through the development of agribusiness farms in Sub Mansapa District of South Nunukan Nunukan is good, it can be seen from the increase in the cattle population and economic growth and the increase of farming communities to raise public interest.*

**Keywords:** *Community Empowerment, Agribusiness Ranch.*

## ABSTRAK

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KABUPATEN NUNUKAN

(Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan  
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

Fauziah  
fauziah1212@gmail.com

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Pengembangan usaha budidaya ternak sapi di Kabupaten Nunukan akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternak melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, pembuatan embung, pasar hewan, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok tani. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu, mekanisme, sosialisasi, proses pemberi bantuan sampai pada pendampingan atau penyuluhun sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya populasi sapi dan meningkatnya perekonomian masyarakat petani serta bertambahnya minat masyarakat untuk berternak.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Agribisnis Peternakan.

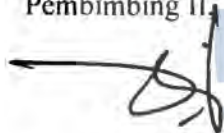
## PERSETUJUAN TAPM

Judul TPAM : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pengembangan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

Penyusun TPAM : Fauziah  
 NIM : 500647358  
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik  
 Hari/Tanggal : Minggu, 19 Juni 2016

Menyetujui:

Pembimbing II,



Dr. Ari Juliana, M.A.  
 NIP. 195807011988032001

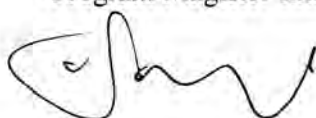
Pembimbing I,



Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si.  
 NIP. 151.100.11

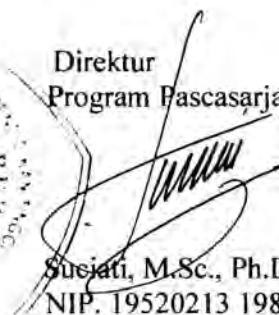
Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Program Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed.  
 NIP. 19591027 1986031 003

Direktur  
 Program Pascasarjana



Suejati, M.Sc., Ph.D.  
 NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Fauziah  
 NIM : 500647358  
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik  
 Judul TPAM : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pengembangan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Juni 2016  
 Waktu : 09.30 – 11.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
 Nama: Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

Tandatangan

Penguji Ahli  
 Nama: Prof. Dr. Endang Wiyatni TL

Pembimbing I  
 Nama: Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si.

Pembimbing II  
 Nama: Dr. Ari Juliana, M.A.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat Rahmat dan Karunia serta Hidayah-Nya lah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)”**.

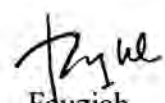
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik itu secara moril maupun secara materiil, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed. selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Ari Juliana, M.A. selaku Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si. selaku Kepala UPBJ-UT Tarakan.
6. Tim Pokjar Nunukan yang banyak membantu selama perkuliahan.

7. Bapak Drs. H. Basri, M.Si. selaku Bupati Nunukan.
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan izin untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan S2.
9. Ibu Ir. Desi Toding Datu, M.Si. selaku Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak yang telah memberikan motivasi, dorongan dan ilmu hingga selesainya penulisan TAPM ini.
10. Ayahanda, Andi Umar Jade (Almarhum) dan Ibunda Hj. Maisuri serta sanak saudara atas segala doa, dukungan dan motivasi yang diberikan.
11. Rekan Sejawat di Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dan Instansi lain di lingkungan Kabupaten Nunukan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan proposal penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis memohon kepada para pembaca barangkali menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini harap maklum. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya tulis yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 19 Juni 2016  
Penulis

  
Fauziah  
NIM: 500647358



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauziah  
 NIM : 500647358  
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
 Administrasi Publik  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tajuncu, 12 Desember 1970  
 Alamat Rumah : KPN Griya Sejahtera Blok E/3 No. 12 Kecamatan  
 Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan  
 Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 35 Tajuncu di Soppeng pada tahun  
 1984  
 : Lulus SMP di SMPN Tajuncu di Soppeng pada tahun  
 1987  
 : Lulus SMA di SMAN Lalabata Riaja di Soppeng  
 pada tahun 1990  
 : Lulus S1 di Universitas Cokroaminoto di Ujung  
 Pandang/Makassar pada tahun 1998  
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d 2008 sebagai CPNS di Dinas  
 Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan  
 : Tahun 2008 s/d 2010 sebagai PNS di Dinas  
 Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan  
 : Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi  
 Perbibitan dan Budidaya Ternak di Dinas Pertanian,  
 Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten  
 Nunukan

Jakarta, 19 Juni 2016

  
 Fauziah  
 NIM: 500647358

## DAFTAR ISI

	Halaman
<i>ABSTRACT</i> .....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	8
2. Upaya Pemerintah dalam Program Pengembangan Agribisnis Peternakan.....	22
3. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	32
D. Operasionalisasi Konsep.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	36
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	44

2. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	47
3. Visi dan Misi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	49
4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	51
5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	52
6. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	55
7. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	56
8. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.....	57
B. Hasil Penelitian.....	66
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.....	66
2. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.....	83
C. Pembahasan.....	90
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.....	90
2. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.....	93

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
---------------------	-----

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan PeternakanKabupaten Nunukan.....	51
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan PeternakanKabupaten Nunukan.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Nunukan terletak di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Iklim usaha di Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh lalu lintas perdagangan antar negara. Hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa Kota Tawau di Negara Bagian Sabah-Malaysia Timur, yang berhadapan langsung dengan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan relatif lebih maju dibandingkan dengan Kota Nunukan.

Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Nunukan sering dikategorikan sebagai daerah tertinggal, masyarakat khususnya penduduk lokal, terisolasi karena keterbatasan infrastruktur yang ada, kurang tersentuh oleh inovasi maupun teknologi baru dan penduduk perbatasan mengakses secara fisik dan ekonomi dengan negara tetangga, akibatnya lalu lintas perdagangan lebih banyak mengalir dari Kota Tawau ke Kecamatan Sebatik dan Nunukan dibandingkan sebaliknya, terutama barang kebutuhan sehari-hari, termasuk diantaranya daging, meskipun hal ini adalah ilegal dan merugikan pemerintah.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap ternak dan produksinya mendorong perlunya perluasan area untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan asal hewan. Untuk mempercepat pertumbuhan subsektor peternakan dalam melaksanakan fungsinya harus diiringi dengan strategi yang menekankan dan mengarah kepada pembangunan Agribisnis Peternakan, mengingat bahwa

pendekatan peningkatan populasi bukan hanya dilihat dari dimensi teknis akan tetapi terkait erat dengan dimensi wilayah guna mewujudkan efisiensi usaha tani.

Pembangunan agribisnis peternakan, dilakukan melalui penataan dan pembinaan keterpaduan antara wilayah, komoditas, petani, kelembagaan, usahatani, pemasaran dan sarana pendukung. Dunia peternakan memang sangat menarik untuk dikaji dan dikupas dari sisi manapun. Sektor yang satu ini mampu memberikan isu strategis yang kiranya layak untuk diangkat ke permukaan. Keberadaannya menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan pokok manusia berupa sumber protein hewani. Namun demikian, berbagai permasalahan masih muncul ke permukaan terkait dengan beberapa kebijakan peternakan yang masih berorientasi pada kelompok tertentu. Pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak terutama peternak kecil yang lemah dari segi manapun. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberdayaan peternak dengan segala konsekuensinya.

Berbagai peraturan pemerintah memberi peluang yang sangat baik untuk mengembangkan usaha agribisnis peternakan dalam meningkatkan populasi ternak nasional. Namun demikian beberapa kebijakan yang ada saat ini perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melihat dampak positif negatifnya. Setiap peraturan yang dibuat diusahakan mampu memberikan keuntungan pada semua pihak yang berkepentingan. Jika salah satu atau beberapa pihak ada yang dirugikan atas kebijakan yang telah ditetapkan, maka sangat mustahil jika selanjutnya kerjasama yang sinergi antar pelaku peternakan yang terkait dapat dibangun diatas pondasi yang kokoh.

Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2001 sudah mulai menerapkan kebijakan pada sektor agribisnis peternakan dengan mendistribusikan ternak sapi bali bibit kepada petani baik dari APBD II maupun bantuan dari pusat melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Populasi sapi bali bibit yang ada di Kabupaten Nunukan terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah ternak yang telah didistribusikan kepada masyarakat terdiri atas APBD II sebanyak 907 ekor, APBN sebanyak 862 ekor dan APBD I sebanyak 788 ekor. Pembagian kepada petani tidak seragam, ada yang 1 ekor, 2 ekor dan 3 ekor per keluarga (Dispertanak, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana APBN untuk implementasi program bantuan sosial, dan diharapkan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), khususnya Kabupaten Nunukan dapat mensinergikan masing-masing program/kegiatannya tersebut dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Nunukan membuat suatu kebijakan dan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi potong dengan mengalokasikan dana APBD untuk mendistribusikan bibit ternak sapi kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap ternak dan produksinya mendorong perlunya perluasan areal untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan asal hewan. Untuk mempercepat pertumbuhan subsektor peternakan dalam melaksanakan fungsinya harus diiringi dengan strategi yang menekankan dan



mengarah kepada pembangunan Agribisnis Peternakan, mengingat bahwa pendekatan peningkatan populasi bukan hanya dilihat dari dimensi teknis akan tetapi terkait erat dengan dimensi wilayah guna mewujudkan efisiensi usahatani. Dengan pembangunan agribisnis peternakan, maka akan dilakukan penataan dan pembinaan keterpaduan antara wilayah, komoditas, petani, kelembagaan, usahatani, pemasaran dan sarana pendukung.

Penduduk Kabupaten Nunukan menurut proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2011 berjumlah 154,269 jiwa dengan rasio tertinggi berada di Kecamatan Nunukan 452,164 jiwa dan terendah di Kecamatan Krayan Selatan 2.248 jiwa. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Nunukan, terutama di Pulau Nunukan dengan persentase 33,81%. Mata pencaharian penduduk sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian (termasuk nelayan, petani dan peternak) sebanyak 58,91% yang menyerap 62,17% dari angkatan kerja, diikuti bidang jasa 13,87% (Nunukan dalam angka, 2014).

Pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan sampai saat ini masih belum optimal, hal ini dikarenakan kurang jelasnya mekanisme pemberian bantuan bibit sapi Sosialisasi: sebelum penyaluran bantuan, terlebih dahulu, kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan pengembangan agribisnis peternakan, proses pemberi bantuan yang kurang tepat sasaran serta kurangnya pendampingan atau penyuluhun. Pengembangan usaha budidaya ternak sapi di Kabupaten Nunukan akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat petani dan peternak melalui peraturan dan kebijakan

daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, pembuatan embung, pasar hewan, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok tani. Kegiatan pendampingan atau penyuluhan harus dilakukan secara berkelanjutan, disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Indikator penilaian dan evaluasi keberhasilan pelayanan pemerintah daerah terhadap pembangunan agribisnis peternakan sebenarnya bisa dilihat langsung dari input dan output program. Secara mudah dapat dikatakan bahwa program dikatakan telah berhasil apabila program dapat berfungsi “umpan balik” sehingga kemudian masyarakat dapat termotivasi sendiri untuk melaksanakan program secara mandiri, sebaliknya jika masyarakat hanya melakukan ketika program masih berjalan dapat dikatakan bahwa program tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis fenomena tersebut secara lebih mendalam, dalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimanakah pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
2. Pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan konsep kebijakan pembangunan khususnya pembangunan agribisnis peternakan yang dilakukan melalui penataan dan

pembinaan keterpaduan antara wilayah, komoditas, petani/peternak, kelembagaan, usahatani, pemasaran dan sarana pendukung.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam memberikan pelayanan subsektor peternakan melalui pendistribusian bantuan ternak sapi bali bibit kepada masyarakat di pedesaan, khususnya terhadap kelompok tani.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan adalah suatu kondisi yang dapat menumbuhkan kemandirian petani-peternak melalui pemberian kekuatan atau daya. Menurut Bryant dan White (1982:15-16), pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan. Petani juga diberi kesempatan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan respon terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya.

Scott dan Jaffe (1994:21), mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan petani-peternak sebagai upaya meningkatkan kepuasan kerja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memberikan kebebasan berkreasi serta mengembangkan hal-hal baru, pengawasan dilakukan melalui berbagai keputusan bersama, pemberian tugas lengkap tidak parsial, berorientasi pada kepuasan orang yang dilayani dan memenuhi kebutuhan pasar. Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan dalam diri manusia dan merupakan suatu sumber kreativitas yang ada dalam diri setiap orang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain.

Hikmat (2001:10), berpendapat bahwa:

Pemberdayaan peternak merupakan sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan orang atau masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya atau suatu usaha dalam membantu orang biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif dalam bidang ekonomi, penguatan sosial atau pengembangan sektor non profit.

Karsidi (2008:22), menyatakan bahwa:

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Prasajo, dkk. (2011:53):

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
- c. Menerapkan rencana tersebut
- d. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (monitoring dan evaluasi)

Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan perencanaan masyarakat, yaitu partisipatif dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, yaitu model "Pemberdayaan Masyarakat".

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" seperti yang dikatakan oleh Chamber (1995) dalam Kartasmita (1996:8). Konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu (Kartasmita, 1996:8).

Selanjutnya Hendayana (2008:10), menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk: a) meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/ kelemahan yang dimilikinya, c) memperkuat dan mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat pedesaan serta meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat.

Menurut Hardiyanto (2007:5):

Pemberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertakan petani dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses inseminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya.

Sedangkan menurut Cook dan Macaulay (1998), pemberdayaan adalah merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu mempergunakan kemampuan untuk meraih tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan Pedoman Umum yang diterbitkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011:4) bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usahanya secara berkelanjutan.

Berbagai masalah yang dihadapi peternak cukup menjadi kendala dalam mengembangkan usahanya. Adapun strategi pemberdayaan yang dapat ditempuh menurut Arifin (2009:10), adalah melakukan hal berikut:

- a. Mengembangkan usaha ternak melalui optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, untuk meraih peluang yang ada berupa perluasan usaha
- b. Mendorong terjadinya konsolidasi antar peternak
- c. Melakukan diversifikasi usaha sebagai langkah antisipasi dari kemungkinan gagalnya usaha ternak.

Menurut Abdurrahman (2010:6):

Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat pedesaan; (2) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di pedesaan berdasarkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan masyarakat; (3) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan pedesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (4) peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan pedesaan; (5) koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan pedesaan; dan (6) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan pedesaan.

Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar, merupakan sebuah konsep yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Keadaan keterbelakangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power* mengakibatkan lapisan masyarakat tertentu tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang “memiliki *power*”. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat bertujuan dua arah, pertama, melepaskan belenggu kemiskinan atau keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur



kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan (Abipraja, 2002:35).

Menurut Kartasasmita (2001:13):

Perubahan yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung kepada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya (memberdayakan masyarakat).

Miarsono (dalam Anonymous, 2003:25), mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan memiliki tiga ciri penting sebagaimana diungkapkan oleh yaitu: 1) motivasi pribadi (*self motivated*), yaitu motivasi untuk memberdayakan diri; 2) dari bawah ke atas (*bottom up*), yaitu bahwa penyusunan program harus mengetahui karakter pembangunan ditempatnya agar tepat sasaran dengan pendekatan *bottom up*, dari masyarakat sendiri; 3). orientasi potensi (*potent oriented*), yaitu menyangkut potensi yang ada pada masyarakat yang harus diberdayakan.

Selain itu pemberdayaan masyarakat menyangkut perubahan bukan hanya kemampuan, melainkan juga sikap, maka menurut Kartasasmita (1996:13), pemberdayaan adalah sebuah konsep kebudayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya akan menghasilkan emansipasi ekonomi dan politik masyarakat lapisan bawah, tetapi juga akan menjadi wahana transformasi budaya.

Pemberdayaan dengan demikian bukan hanya konsep ekonomi atau hanya konsep politik, tetapi merupakan konsep menyeluruh atau yang berada pada posisi belum dimanfaatkan secara penuh potensinya melalui pemberdayaan diharapkan dapat meningkat bukan hanya ekonominya, melainkan juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat potensi

tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Mochtar (1993) dalam Warya (2005:20), mengemukakan bahwa:

Bentuk dan cara pemberdayaan sangat beraneka ragam, mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan petani kearah kemandirian dan ketangguhannya dalam berusahatani. Kondisi tersebut dapat ditumbuhkan melalui pendidikan/penyuluhan dalam membentuk perubahan perilaku, yakni meningkatkan kemampuan petani untuk dapat menentukan sendiri pilihannya, dan memberikan respons yang tepat terhadap berbagai perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya dan mendorong untuk lebih mandiri.

Pemberdayaan petani-peternak ini penting karena dalam proses pembangunan pertanian, petani merupakan sumberdaya pembangunan yang berperan sebagai pelaku utama dalam mengembangkan usahatani. Menurut Kartasmita (1996:9-10):

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, seperti penjelasan berikut. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan dalam wadah kelompok sebagai bentuk organisasi yang berakar di masyarakat.

Organisasi tersebut merupakan satu sumber daya yang penting, sehingga untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali. Ini dikarenakan warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri, sehingga harus menggunakan pendekatan kelompok sebagai suatu organisasi yang mewadahi warga masyarakat untuk dapat berdaya. Di samping itu pendekatan kelompok juga paling efektif dan dinilai dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Kartasmita, 1996:10).

Menurut Hersupomo (dalam Wiati, 2002:16), “birokrasi merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat”. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Peranan pembuat kebijaksanaan dalam hal ini harus lebih bersifat menjadi fasilitator, bukan memberikan petunjuk dan aturan-aturan main tetapi lebih banyak menjadi fasilitator daripada regulator khususnya melalui terciptanya suasana partisipatif dari rakyat pedesaan dalam pembangunan daerah. Menurut Soetrisno (1995:242-243), langkah yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi dalam pembangunan.

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah, khususnya pada bantuan ternak sapi bibit maka strategi dan proses pemberdayaannya praktis merupakan penerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat sehingga sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga dengan demikian, rakyat dan lingkungannya akan

mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis (Kartasasmita, 2001:7).

Menurut Abipraja (2002:21), pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dengan kemitraan yang erat antara masyarakat yang sementara berkembang. Dalam hubungan ini pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengolahan surplus usaha.

Dijelaskan lagi oleh Kartasasmita (2001:14), pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat pelaksana dan pengelola (*acceptable*), kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan kelompok tani merupakan salah satu unsur penting dari pembangunan nasional terutama saat perekonomian Indonesia terpuruk akibat krisis ekonomi. Dalam konteks ini, membangun pedesaan berarti membangun potensi ekonomi dalam skala luas, karena 70 - 80 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar penduduk desa miskin dan terbelakang. Dengan ciri umum yang ditandai struktur kegiatan berbasis agraris atau pertanian, kepadatan penduduk lebih jarang, cara hidup maupun pola budaya yang dekat dengan pemanfaatan sumber daya alam, tempat tinggal penduduk berkelompok tersebar, potensi tenaga dengan pendidikan yang baik, agak langka, dan mempunyai sistem organisasi sederhana berbasis kegiatan primer, dan lain-lain (Abipraja, 2002:45).

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005 - 2025. Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Kedepan, agar dapat berperan sebagai kelompok tani yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan kelompok tani itu sendiri sehingga menjadi mandiri dalam mendukung pembangunan kawasan agribisnis. Pembentukan dan pengembangan kelompok tani di setiap desa juga harus menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip pemberdayaan. Pendekatan yang

*top-down* planning menyebabkan partisipasi kelompok tani tidak tumbuh (Suradisastra, 2008; Syahyuti, 2007).

Pemberdayaan petani di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok yang dimaksud, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan kelompok tani secara hakiki (Syahyuti, 2003; Suradisastra, 2008).

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Pengembangan kelompok tani dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan petani dalam mengakses berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi (Saptana, dkk, 2004). Sedangkan menurut Suradisastra, (2008), kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan vertikal.

Secara konseptual tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal ataupun ganda. Khusus untuk kegiatan ekonomi, terdapat banyak lembaga pedesaan yang diarahkan sebagai lembaga ekonomi, diantaranya adalah kelompok tani, koperasi dan kelompok usaha agribisnis. Secara konseptual masing-masing dapat menjalankan peran yang sama (tumpang tindih). Berdasarkan konsep sistem agribisnis, aktivitas pertanian pedesaan tidak akan keluar dari upaya untuk menyediakan sarana produksi (benih, pupuk dan

obat-obatan), permodalan usahatani, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan berusaha tani (*on farm*), pemenuhan informasi dan teknologi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Syahyuti, 2008; Kasijadi, Suryadi dan Suwono, 2003).

Menurut Ismawan (2000:16) ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses pemberdayaan dalam kelompok swadaya masyarakat, yaitu : pertama, faktor internal yang meliputi anggota, pengurus, kegiatan dan mekanisme kerja; kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial-ekonomi, hubungan dengan pamong, program-program terpadu, dan ketiga adalah pendampingan.

Pertama, faktor internal kelompok: *Anggota* yaitu inti dari kelompok swadaya masyarakat adalah individu, salah satu prasyarat kemandirian kelompok swadaya adalah memadainya kualitas anggota. Kualitas dimaksud menyangkut hal-hal seperti keluasan wawasan, kedalaman pengetahuan, kematangan mental dan penguasaan keterampilan. *Pengurus* adalah motor penggerak kelompok karena mati hidupnya kelompok sering ditentukan oleh aktif tidaknya pengurus. Oleh karena itu kualitas pengurus harus ditingkatkan. Pengurus diharapkan memiliki komitmen yang tinggi, kemampuan manajerial yang memadai, wawasan yang terbuka, jaringan yang luas, dan kepemimpinan yang menonjol. *Kegiatan* merupakan hal yang sangat penting dalam memandirikan kelompok, tetapi kerap kali disepelekan, adalah memilih kegiatan yang tepat. Kegiatan yang dilaksanakan tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata anggota, melainkan semata untuk mengejar target kegiatan atau program kerja, sehingga meskipun berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan tetapi kelompok tidak menjadi mandiri, bahkan ketergantungan anggota semakin besar. Untuk jangka panjang tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota karena tidak termotivasi untuk

terlibat dalam aktivitas kelompok. Mekanisme kerja merupakan hal yang harus dimiliki suatu kelompok agar dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Mekanisme kerja pada awal kelompok harus disusun sesuai dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan praktik hidup anggota. Baru pada tahap selanjutnya diselaraskan dengan tingkat perkembangan anggota dan kompleksitas pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.

Kedua, faktor eksternal kelompok: lingkungan sosial-ekonomi, lingkungan yang kondusif merupakan prasyarat kemandirian kelompok. Sikap saling tidak percaya dan saling curiga sebagai dampak dari krisis sosial politik yang lebih luas dapat menghancurkan fundamen kelompok, yaitu kepercayaan dan keterbukaan. Hubungan dengan pamong, harus bersifat luwes dalam arti tidak terdominasi atau terkooptasi oleh pamong tanpa harus berseberangan.

Ketiga, faktor pendampingan; masyarakat yang kurang berdaya pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Pengembangan tersebut memerlukan agen pengubah yang berperan untuk mendorong dan mengkoordinasikan perubahan. Di dalam program pemberdayaan masyarakat yang mempunyai fungsi relevan sebagai agen pengubah adalah pendamping/konsultan untuk membimbing warga masyarakat tersebut dalam upaya memperbaiki kesejahteraan maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan menghadapi dan menyesuaikan kegiatan dalam setiap perubahan yang dihadapi baik secara kelompok, maupun individu. Dengan demikian pendampingan kelompok masyarakat menjadi penting, karena seringkali anggota kelompok terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan terbatas di bidang manajemen, pemasaran maupun teknologi. Namun demikian tidak jarang ditemui



hal yang sebaliknya, dimana justru pendampinglah yang menjadi sebab ketidakmandirian kelompok yang dibinanya.

Pendamping menurut Ismawan (2000:19) adalah mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat melaksanakan agenda-agenda dan mencapai tujuan. Hal yang sama berlaku dalam pemberdayaan kelompok tani seperti dikemukakan oleh Fatah *et al.* (2000:3), bahwa peran pendampingan yang dilakukan mencakup: (1) menciptakan suasana atau iklim kerja yang memungkinkan berkembangnya potensi petani/kelompok tani untuk dapat bertindak sesuai keadaan, kebutuhan dan prioritas mereka sendiri; (2) membantu petani/kelompok tani menemukan, mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan (3) mengembangkan potensi petani/kelompok tani dalam menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dan kepeloporan dalam pembangunan pertanian pedesaan.

Fatah *et al.*, (2000:1) mengemukakan aspek pengelolaan dalam konteks pemberdayaan kelompok tani meliputi tahap identifikasi keadaan petani/kelompok tani, perencanaan kegiatan kelompok tani dan perencanaan pendampingan oleh penyuluh, pelaksanaan rencana-rencana tersebut, monitoring pelaksanaan rencana-rencana tersebut, dan evaluasi pelaksanaan rencana-rencana, serta perencanaan kembali tahun berikutnya. Proses penerapan ini merupakan rangkaian tahapan atau daur masing-masing bagian saling berhubungan erat sebagai kerangka dasar bagi petani/kelompok tani dalam melakukan setiap program (kegiatan yang sifatnya dasar). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan faktual, logis, dan operasional serta

dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang dianggap oleh kelompok tani terkait (pendekatan partisipatif).

Secara operasional, penerapan strategi dan proses pemberdayaan kelompok tani harus selalu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kelompok tani yang bersangkutan. Sebagai kerangka pemikiran penerapan strategi dan proses pemberdayaan kelompok tani ini, ada empat elemen sistem yang merupakan kunci dan harus diperkuat secara proporsional, yaitu organisasi, usaha, modal dan jaringan kerja (Fatah et al., 2000:8). Kelompok tani sebagai kumpulan orang-orang atau petani yang menyangkut tentang keorganisasian kelompok, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan tempat bagi setiap anggota untuk mengaktualisasikan dirinya.

Kedua, adalah kegiatan usaha tani, perlu dikelola secara efisien dan berorientasi agribisnis agar dapat memberikan keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Ketiga, pengembangan dan pengelolaan usaha memerlukan dukungan modal yang cukup. Pengertian modal bukan hanya menyangkut tentang cara memperoleh modal, tetapi juga tentang pengelolaan modal agar dapat berkembang dan mencukupi kebutuhan usaha. Keempat, dalam rangka mengembangkan kelompok baik dalam organisasi, kegiatan usaha maupun permodalan, maka diperlukan kerjasama yang kuat diantara kelompok dengan pihak lain.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Program Pengembangan Agribisnis Peternakan**

Pembangunan agribisnis di Indonesia memperoleh perhatian yang besar di tatanan pembuat kebijakan publik. Lebih jauh dari itu, agribisnis telah menjadi obyek studi di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan pemikiran konsep agribisnis, pembangunan pertanian sulit berhasil mencapai tujuannya apabila tidak ada sinergi di antara subsistem yang ada dalam sistem agribisnis. Untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang demikian dilakukan berbagai program dan kegiatan secara bertahap yang diharapkan dapat mendorong perkembangan agribisnis dimulai dari tahap perkembangan sistem dan usaha agribisnis yang ada di setiap daerah.

Menurut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011:54), peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani dapat dilakukan melalui: (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur peternakan termasuk infrastruktur perbenihan/perbibitan; (2) penguatan kelembagaan peternak melalui penumbuhan dan penguatan kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan peternakan melalui perluasan akses peternak ke sistem pembiayaan; (5) penciptaan sistem pasar yang menguntungkan peternak; dan (6) pengembangan kapasitas pelaku agribisnis melalui pelatihan.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal peternak serta lemahnya organisasi usaha dan jejaring kerjanya sehingga akses informasi menjadi terkendala. Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah sejak tahun 2001 merintis pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi Bantuan Sosial berupa bantuan dana yang langsung ditransfer ke rekening kelompok atau dalam bentuk barang. Dana Bantuan Sosial ini dialokasikan dalam rangka pematapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha mandiri yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan peternakan yang akan menjadi embrio tumbuhnya lembaga usaha peternak yang kokoh di kawasan pembangunan wilayah.

Bibit mempengaruhi produktivitas ternak. Kondisi ternak sapi lokal saat ini telah mengalami degradasi produksi dan bentuk tubuhnya kecil (Wijono, *et al.* 2003). Hal ini karena mutu genetik sapi lokal makin menurun. Makin baik bibit yang digunakan, walaupun dari bibit lokal tetapi diseleksi, produktivitas makin meningkat. Demikian halnya dengan pakan yang diberikan; makin baik pakan, produktivitas ternak makin meningkat. Pakan merupakan sarana produksi yang sangat penting bagi ternak karena berperan sebagai pemacu pertumbuhan.

Namun, dalam usaha penggemukan, selain pakan juga perlu diperhatikan aspek pemeliharaan, seperti perbaikan kandang dan pemanfaatan limbah untuk pakan. Menurut Hendayana dan Yusuf (2003:12), untuk menjamin keberlanjutan usaha, perlu upaya menanam tanaman pakan dan membuat hay (rumpuk dan jerami). Pembangunan peternakan harus dilakukan dengan pola pembangunan berkelanjutan yang diartikan sebagai upaya pengelolaan dan konservasi sumber

daya peternakan (lahan, air, dan sumber daya genetik) melalui orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya kebutuhan yang diperlukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Pembangunan peternakan berkelanjutan yang memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air dan sumber daya genetik tanaman dan hewan tersebut harus berwawasan lingkungan, artinya: tidak menimbulkan pencemaran serta degradasi dalam mutu lingkungan hidup, yakni secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak diusahakan, secara sosial dapat diterima, secara ekologis tetap menjamin keseimbangan ekosistem lainnya. Implikasinya pembangunan peternakan berwawasan lingkungan adalah: (1) terpeliharanya kapasitas produksi sumber daya alam, (2) mengurangi dampak pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup, (3) dapat menghasilkan produk primer maupun sekunder yang berkualitas dan higienis dan berdaya saing tinggi, serta (4) dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai bagi peternak.

Dilihat dari basis sumber daya yang digunakan, agribisnis peternakan sangat tergantung pada faktor ekosistem atau lingkungan. Oleh karena itu pembangunan peternakan dengan pendekatan agribisnis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan sesuai dengan ekosistem spesifik lokasi dimana agribisnis dikembangkan. Strategi pembangunan peternakan yang berkelanjutan pada sistem produksi dilakukan dengan pendekatan usahatani (*farming system*) berupa integrasi tanaman dan ternak, pendaurulang bahan organik, pengolahan lahan konservasi, pengurangan bahan input kimia (LISA = *Low Input Sustainable Agriculture*), pengendalian hama terpadu dan sistem produksi tanaman-ternak.

Pada subsistem agroindustri dilakukan pengolahan produksi peternakan primer menjadi sekunder atau tersier serta pengolahan limbah. Beberapa keuntungan pembangunan peternakan yang berkelanjutan dengan pendekatan agribisnis antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan agribisnis peternakan didasarkan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) tidak akan pernah habis.
- b. Kegiatan agribisnis peternakan dapat diintegrasikan dengan mudah sehingga interaksi masyarakat dengan lingkungan dapat dipertahankan.
- c. Dapat membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dengan adanya nilai tambah hasil produksi peternakan bersifat standar, berkualitas baik dan berdaya saing tinggi.

Bertitik tolak pada fokus permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka pemberdayaan kelompok tani sangat terkait erat dengan kemampuan penyediaan sumber daya manusianya, sumber dana maupun sarana dan sarana dalam mengelola kelompok dan sistem penyediaan sumber-sumber daya tersebut yang melingkupinya.

### **3. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)**

PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri yang melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, yang diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan

penguatan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

PUAP merupakan salah satu subsidi dari pemerintah untuk rumah tangga petani miskin berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk barang sarana produksi pertanian maupun dalam bentuk modal keuangan. Subsidi dipandang sebagai pajak negatif (*negative tax*), karena subsidi menambah pendapatan nyata. Sebagaimana halnya pajak, manfaat pemberian subsidi terbagi-bagi antara produsen dan konsumen, tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. Jika subsidi diberikan kepada petani, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Hal ini berimplikasi kepada penurunan harga disertai penambahan output hasil pertanian. Efek positif dari pemberian subsidi adalah peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan output.

Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggota. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan maksimal sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut disalurkan ke setiap anggota Gapoktan untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain: memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan

dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota (Kementerian Pertanian, 2011). Tujuan utama dari program PUAP adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh pertanian, dan penyelia mitra tani.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan jejaring atau mitra kelembagaan keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
- b. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Program PUAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008, pelaksanaannya melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut: (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP; (2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau; (3) Fasilitasi modal usaha bagi petani



kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; 4) Penguatan kelembagaan gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki petani.

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- a. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.

- b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, maka untuk menilai keberhasilan program PUAP, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Untuk mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP berjalan lancar, maka dibentuklah suatu tim pemantau, pembinaan, dan pengendalian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP di tingkat kabupaten/kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya.

Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina PUAP provinsi hingga tim teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

## B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini penulis akan mengemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis mengenai analisis program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Teori	Metode	Kesimpulan
1	Robi Darwis (2014) Analisis Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP dalam Upaya Kesejahteraan Anggota Kelompok (Studi Kasus Gapoktan Desa Tanjung Tebat Kabupaten Bengkulu Selatan)	-	Deskriptif Kualitatif	Dinas pertanian melalui Gapoktan Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP kepada kelompok tani dengan baik, Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh dinas pertanian melalui program PUAP berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani.
2	Triane Widya Anggriani (2012), Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor	-	Kuantitatif	Hasil penelitian menyarankan bahwa Program PUAP layak dipertahankan karena dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu perlu diaktifkannya peran penyuluh pendamping gapoktan, karena pengurus gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan dalam mengembangkan usahanya, termasuk

				dalam hal administrasi maupun dalam hal budidaya usaha tani tanaman pangan dan hortikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan berkelanjutan.
3	Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Agribisnis Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sipogu		Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh program Puap yang cukup kuat terhadap tingkat sosial ekonomi masyarakat didesa Sipogu. Hal ini dapat dilihat dengan interpretasi tabel koefisien korelasi <i>Product Moment</i> terhadap hasil perhitungan koefisien korelasi observasi sebesar $r_{xy} = 0,61$ yang terletak antara 0,60-0,799 yang diartikan korelasinya positif signifikan kuat atau tinggi. Sehingga hipotesis nihil $H_0$ ditolak, dan $H_a$ diterima dengan sumbangan keberpengaruhan sebesar 37,21%.

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kalitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada locus penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### C. Kerangka Berpikir

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa tahapan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dilakukan sebagai upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani. Masyarakat dilibatkan dengan proses yang menyangkut hubungan kekuatan yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga agar dapat menciptakan perubahan yang terjadi yang dapat membantu masyarakat menciptakan perubahan yang membantu masyarakat menciptakan lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan itu lebih kepada pengembangan masyarakat dengan mencakup Tridaya yaitu sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan dengan strategi antara lain; mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya, maka dilakukan penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok yang nantinya masyarakat tersebut mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu dengan kepentingan dan kebutuhan bersama, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri yaitu menekankan pada proses pembangunan dan sinergi upaya memberdayakan kelompok tani.

Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan memandang penyebab persoalan lemahnya pemberdayaan kelompok tani adalah karena masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan pada prilaku, sikap, cara pandang yang tidak dilandasi

pada nilai-nilai universal. Perubahan perilaku masyarakat mempengaruhi pada usaha pencapaian dalam pemenuhan kebutuhan pokok. kondisi masyarakat yang rentan dengan tidak memiliki kemampuan dalam mengakses modal menjadikan masyarakat dan kelompok tani masuk pada lingkaran belum berdaya.

Oleh sebab itu pendekatan pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui partisipasi masyarakat dengan menggali potensi sesuai kebutuhan masyarakat dengan meberikan fasilitas yang dapat diakses dengan tujuan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Di bidang ekonomi Program Pengembangan Agribisnis Peternakan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dan khususnya kelompok tani untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada, yang dapat digunakan kelompok tani atau masyarakat membuka usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat atau kelompok tani.

Dalam pemberian bantuan modal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan juga memberikan kesempatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, artinya masyarakat dilibatkan dalam penentuan penerima bantuan. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan memberikan bantuan dan mendampingi masyarakat penerima manfaat dengan tujuan agar masyarakat dapat keluar dari kondisi ketidak berdayaannya.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Operasionalisasi Konsep**

Agar konsep-konsep yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi jelas maka diperlukan batasan pengertian konseptual, adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah pengembangan masyarakat melalui pengadaan bantuan modal dengan mencakup Tridaya yaitu sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan dengan mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri yaitu menekankan pada proses pembangunan dan sinergi upaya memberdayakan kelompok tani guna memenuhi kehidupan secara layak.

2. Kelompok tani (KT) adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal seperti sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Menurut Irawan (2007:4.21), “desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi”. Desain penelitian sangat penting sebab desain ini yang menentukan kualitas penelitian secara keseluruhan. Permasalahan penelitian adalah cara peneliti mengungkapkan apa yang ingin ia teliti. Permasalahan penelitian merupakan manifestasi atau perwujudan sesuatu yang mengusik dan mengganggu pikiran seorang peneliti, peneliti perlu jawaban untuk memuaskan hasrat ingin tahu yang mengganggu pikiran dan perasaannya itu.

Dalam kerangka teoritik, peneliti mulai mempertajam permasalahan penelitiannya ketahapan yang lebih bersifat ilmiah, dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih jelas, teramati dan terukur. Sedangkan di dalam metodologi penelitian, mulai memikirkan bagaimana penelitian itu dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien dan paling mampu membantunya menemukan kebenaran yang dicari. Sehingga dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi penelitian. Ketiganya harus dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang integral. Jika berdiri sendiri-sendiri maka ketiganya tidak mempunyai makna apa-apa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini

dianggap sangat relevan dengan materi penulisan thesis, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti, selain itu guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada di lokasi penelitian.

Menurut Nawawi (1983:63), ia mengatakan bahwa metode deskriptif didefinisikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

#### **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Menurut Irawan (2007:426), penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Walaupun kata sampel muncul dalam metode kualitatif maka sampel ini tidak bersifat mewakili populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang diwakilinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian non populasi dan pengumpulan datanya dalam bentuk informan.

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183), pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjective*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Sesuai dengan permasalahan dan fokus masalah, maka sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
2. Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
3. Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
4. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
5. Ketua Kelompok Tani (KT)
6. Anggota Kelompok Tani (KT)

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Moleong (2007:17), menyatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan. Oleh karena itu yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sekaligus

berperan sebagai alat pengumpul data, selain itu ia juga menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian disamping bantuan orang lain (narasumber).

Dalam penelitian, Moleong (2007:169-172), menyarankan ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian, antara lain:

- a. Responsif. Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
- b. Dapat menyesuaikan diri. Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data
- c. Menekankan keutuhan. Manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasinya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan di mana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang riil, benar, dan mempunyai arti.
- d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. Manusia sebagai instrumen penelitian ini terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
- e. Memproses data secepatnya. Kemampuan lain yang ada pada manusia sebagai instrumen ialah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
- f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan. Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
- g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik. Manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan *reliable*, yang bisa dipenuhi melalui penelitian kelapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri untuk melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang *setting* dan *field* penelitian. Selanjutnya setelah peneliti melakukan persiapan tersebut dilanjutkan dengan penelitian utama yaitu

melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) mengenai permasalahan yang di teliti kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Instrumen bantu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pedoman wawancara (*interview guide*) tersebut kemudian digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara agar dalam praktiknya lebih fleksibel dan tidak kaku. *Tape recorder* digunakan untuk merekam hasil wawancara dan camera digunakan untuk membuat dokumentasi atau peristiwa tertentu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Semua instrumen diatas digunakan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dilapangan.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data serta informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indept interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan para informan yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Informasi

Teknologi dan Bina Usaha, Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani (KKT) dan 2 orang Anggota Kelompok Tani (AKT). Metode wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data primer dari para informan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi partisipasi (*participant observation*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan terlibat secara langsung dengan aktivitas keseharian dari objek yang diteliti. Observasi dipergunakan untuk mengamati perilaku objek yang diteliti dalam melaksanakan pekerjaan, hubungan kerja, dan aktifitas lainnya selama melakukan pekerjaan.
3. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, literatur, buku-buku bacaan, bulletin atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini memberikan keuntungan dari penggunaan data dari bahan-bahan yang tersedia dan siap pakai.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif. Menurut Arikunto (2005:250), metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi.

Bogdan dalam Sugiyono (2008:88), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sementara Sugiyono (2008:89), berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada proses yang disarankan Irawan (2012:5.23), sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah melalui wawancara terhadap *key informan*, kajian pustaka kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Pembuatan transkrip data yaitu proses pemindahan data yang diperoleh dalam bentuk rekaman atau tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk tertulis dan terstruktur.
3. Pembuatan koding yaitu proses pemilihan dan pemusatan data yang telah ditranskrip dipilah pada bagian-bagian tertentu untuk menemukan hal-hal yang penting perlu dicatat sebagai kata kunci dan nantinya diberi kode.
4. Membuat kategorisasi data. Pada tahap ini data yang telah diberi kode dikelompokkan menurut jenisnya dan disederhanakan dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dalam satu besaran yang disebut dengan istilah kategori.
5. Membuat kesimpulan sementara. Pada proses ini dari kategori data yang sudah dibuat ditarik kesimpulan sementara sehingga data yang diperoleh memiliki makna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
6. Triangulasi, yaitu proses pengecekan data dan membandingkan dengan data hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan data lainnya yang relevan. Beberapa kesimpulan sementara dapat dipilah menjadi kategori-kategori yang lebih sederhana atau jika terdapat kategori yang memiliki makna yang berbeda maka dapat dimunculkan kategori baru dalam penyimpulan hasil penelitian.

7. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan akhir dibuat merupakan reduksi dari hasil triangulasi dalam kata-kata yang lebih sederhana, general dan bermakna.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data mentah, 2) Pembuatan transkrip data, 3) Pembuatan koding, 4) Pembuatan kategorisasi data, 5) Pembuatan kesimpulan sementara, 6) Triangulasi, dan 7) Penarikan kesimpulan.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah 14.585,70 Km<sup>2</sup> dengan letak Geografisnya antara 115°22'30 BT sampai dengan 118°44'54 BT dan 3°30'00 sampai dengan 4°24'55' LU. Secara administratif Kabupaten Nunukan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Sulawesi
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia.

Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh topografi yang bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan ketinggian perbukitan antara 500 Meter sampai dengan 3.000 Meter dari permukaan laut (DPL). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat laut dan utara. Secara garis besar dari 1.458.570 Ha keadaan topografi perbukitan memiliki sudut kelerengan lebih dari 30%, untuk daerah yang merupakan dataran tinggi mempunyai kemiringan berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal di atas 15%.

Sehingga dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0-50%. Sedangkan untuk Pulau Nunukan sendiri di sebelah barat daya pada umumnya memiliki daerah yang sangat curam, sedangkan di bagian pantai timur daerahnya sedikit bergelombang antara 3-8 % dan yang berbukit sekitar 15-25%. Begitu pula dengan daerah Pulau Sebatik, topografinya hampir sama dengan Pulau Nunukan, daerahnya datar dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-3%.

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nunukan terdiri dari 1 Desa dan 4 Kelurahan
- b. Nunukan Selatan terdiri dari 4 Kelurahan
- c. Seimenggaris terdiri dari 4 Desa
- d. Sebatik terdiri dari 4 Desa
- e. Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa
- f. Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa
- g. Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa
- h. Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa
- i. Sebuku terdiri dari 12 Desa
- j. Tulin Onsoi terdiri dari 12 Desa
- k. Sembakung terdiri dari 10 Desa
- l. Sembakung Atulai terdiri dari 10 Desa
- m. Lumbis terdiri dari 28 Desa
- n. Lumis Ogong terdiri dari 49 Desa
- o. Krayan terdiri dari 65 Desa
- p. Krayan Selatan terdiri dari 24 Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut Sensus Penduduk Tahun 2015 sebanyak 140.841 jiwa yang terdiri dari 75.171 jiwa penduduk laki-laki dan 65.670 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan rata-rata 9,87 jiwa per Km<sup>2</sup>. Rasio penduduk menunjukkan angka 114,47 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung oleh Instansi Pemerintah dengan jumlah PNS sebanyak 4.421 orang pegawai.

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan. Dasar pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan dalam Wilayah Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan Selatan membawahi empat Kelurahan yaitu sebagai berikut: Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Mansapa, Kelurahan Nunukan Selatan, dan Kelurahan Selisun.

Kecamatan Nunukan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nunukan di sebelah utara, Selat Nunukan di sebelah timur dan selatan, serta Desa Binusan dan Kelurahan Nunukan Barat di sebelah Barat. Pembangunan di bidang pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok besar masyarakat, disamping itu juga untuk mendukung pertumbuhan industri. Sektor pertanian masih menjadi potensi ekonomi yang paling menonjol dan sudah diberdayakan sejak lama di Kecamatan Nunukan Selatan.

## **2. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (Dispertanak) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 3) dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi dan sumber daya ternak;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang informasi teknologi dan bina usaha;
- g. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan hingga saat ini masih dijumpai berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Produksi, produktivitas dan pengelolaan usaha tani belum optimal, penguasaan teknologi masih rendah serta terbatasnya ketersediaan benih dan bibit ternak;
- b. Belum memadainya jalan dan jaringan irigasi yang mendukung proses produksi serta pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- c. Terbatasnya prasarana dan sarana produksi yang meliputi bibit/benih, pupuk, pestisida, obat-obatan ternak, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- d. Kurangnya akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan permodalan;
- e. Rendahnya daya saing hasil pertanian dan peternakan
- f. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani
- g. Belum terpadu, efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan penyuluhan

### **3. Visi dan Misi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sejalan dengan Visi Kabupaten Nunukan 2011-2016, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, telah ditetapkan Visi SKPD Kabupaten Nunukan sebagai berikut: “Terwujudnya Pertanian yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Dalam Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016 tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanian yang Tagguh, artinya pertanian yang secara dinamis dan ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya, tenaga, modal dan teknologi yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Mandiri, artinya terjadinya kondisi kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan pada bidang pertanian tanaman pangan berupa mandiri beras dan ubi kayu, di bidang hortikultura berupa mandiri dan mendukung penyediaan buah-buahan pisang, durian, dan jeruk di Kalimantan Timur dan di bidang peternakan mandiri dalam penyediaan daging dan telur.
- c. Berdaya Saing, artinya produksi pertanian dan peternakan yang dihasilkan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas dan mutu yang baik mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dan peternakan dari luar daerah maupun luar negeri dengan ketersediaan yang cukup.

Untuk dapat mewujudkan Visi dengan mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan pernyataan yang digunakan untuk menetapkan tujuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan visi tersebut, menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan
- b. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan peternakan
- c. Meningkatkan sistem informasi pertanian dan peternakan

- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pertanian dan peternakan

#### **4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

Tujuan merupakan penjabaran yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, sedangkan sasaran adalah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan kata lain tujuan dapat diartikan sebagai suatu karakteristik yang ideal dan mengandung nilai-nilai hukum dan hasrat yang kuat untuk menjadi lebih.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dalam proses perencanaan sebagai pemerintahan kabupaten. Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan pada berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan	1). Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 2). Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman 3). Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan 4). Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner



	5). Meningkatkan mutu produksi, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan peternakan 6). Meningkatkan inovasi teknologi pertanian dan peternakan tepat guna
2. Meningkatkan luas kawasan areal tanaman pangan dan hortikultura	1). Meningkatkan luas areal sawah hortikultura dan optimasi lahan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan	1). Meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan 2). Meningkatkan jaringan irigasi dan jalan usaha tani 3). Meningkatkan lahan pertanian yang bersertifikat
4. Tersedianya data dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan tepat waktu	1). Meningkatkan ketersediaan data dan pelayanan data dan informasi pertanian
5. Meningkatkan kinerja aparatur pertanian	1). Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur 2). Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
6. Terwujudnya petani/peternak yang berdaya saing dalam pengelolaan usaha tani	1). Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan petani/peternak 2). Meningkatkan dinamisasi kelembagaan kelompok tani

Sumber: Renstra Dispersertan Kabupaten Nunukan (2016)

## 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang bertujuan untuk: (1) Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan, (2) Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan

sasaran, (3) Menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Kebijakan minimal yang harus dikembangkan meliputi: (a) Kebijakan Publik, (b) Kebijakan Teknis, (c) Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi (Sarana dan Prasarana), (d) Kebijakan Personalia, (e) Kebijakan Keuangan, dan (f) Kebijakan Pelayanan Masyarakat.

Strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan paket teknologi pertanian dan peternakan
- b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan pertanian
- c. Penyediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan
- d. Pembangunan jaringan irigasi, embung dan jalan usaha tani
- e. Melaksanakan sertifikasi lahan usaha tani
- f. Pengembangan data dan informasi pertanian dan peternakan
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang bagi aparatur
- h. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor
- i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang bagi petani/peternak
- j. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani.

Strategi yang telah ditetapkan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Dengan kebijakan yang ditentukan diharapkan strategi yang dijalankan bias efektif untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Adapun kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan intensifikasi usaha tani
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak
- d. Meningkatkan perlindungan hewan terhadap penyakit menular strategis dan zoonosis
- e. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil ternak
- f. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan
- g. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani tentang inovasi teknologi tepat guna dan penyediaan sarana teknologi tepat guna
- h. Sertifikasi lahan usaha pertanian
- i. Melakukan cetak sawah, optimasi lahan dan pembukaan lahan hortikultura
- j. Pengadaan alat dan mesin pertanian
- k. Pembangunan JITUT, JIDES, Embung dan JUT
- l. Melakukan pengumpulan, penyajian dan penyebaran data dan informasi
- m. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Diklat, magang atau bimbingan teknis
- n. Penambahan jumlah sarana dan prasarana aparatur
- o. Melakukan pemeliharaan barang inventaris dan asset secara berkala
- p. Menyelenggarakan Diklat, bimbingan teknis, dan magang bagi petani/peternak

- q. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani

## **6. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan ditunjang dengan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - 1). Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
  - 2). Sub Bagian Keuangan
  - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang PLA, Sarana, Prasarana dan Pasca Panen, terdiri dari:
  - 1). Seksi PLA dan Sarana Prasarana
  - 2). Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen
- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  - 1). Seksi Produksi Padi dan Palawija
  - 2). Seksi Produksi Hortikultura dan Biofarmaka
  - 3). Seksi Perlindungan Tanaman
- e. Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak, terdiri dari:
  - 1). Seksi Pembibitan dan Sumber Daya Ternak
  - 2). Seksi Pakan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
  - 3). Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

- f. Bidang Informasi, Teknologi dan Bina Usaha, terdiri dari:
  - 1). Seksi Informasi, Pendataan dan Pengkajian Pengembangan Teknologi
  - 2). Seksi Kelembagaan, Permodalan dan Bina Usaha
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **7. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan**

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 105 orang yang terdiri dari 19 pejabat struktural, 23 orang pegawai non struktural, dan 62 orang tenaga honorer. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan jumlah SDM (PNS) yang ada keadaan tersebut telah mencukupi kebutuhan. Hal ini dengan telah terisinya jabatan struktural yang ada. Namun demikian masih perlu tenaga PNS untuk pengisian jabatan staf administrasi dan petugas lapangan di wilayah kecamatan sebagai pengumpul data pertanian. Di samping itu prioritas perlu diberikan kepada pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas aparatur, terutama pada penguasaan teknis keahlian dan pengembangan keilmuan.

Berikut ini akan disajikan kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan:

**Tabel 4.2**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan**  
**Kabupaten Nunukan**

No	Klasifikasi	PNS Golongan				Non PNS	Jml	Tingkat Pendidikan					Jml
		I	II	III	IV			SMP	SMA	D3	S1	S1	
1.	<b>Struktural</b>												
	- Eselon II				1							1	
	- Eselon III			4	1					1	3	1	
	- Eselon IV			13			3				13		3
2.	<b>Non Jabatan</b>	4	16	3			23	1	16	4	2	-	23
3.	<b>Honorer</b>					62	62		41	3	18		2
	<b>Jumlah</b>	4	16	21	2	62	105	1	57	8	37	2	105

Sumber: Renstra Disperanak Kabupaten Nunukan (2016)

### 8. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam rangka menyikapi era keterbukaan informasi dan reformasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus mampu memberikan pelayanan informasi produk yang dihasilkan dalam bentuk publikasi sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Dalam memberikan pelayanan data dan informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengembangan produksi tanaman pangan serta benih tanaman pangan dimana secara sistematis tercakup masalah pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan, penanganan panen, pengolahan hasil,

- pemasaran dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta melakukan evaluasi penerapan standar perbenihan tanaman pangan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengembangan produksi hortikultura, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura serta benih hortikultura yang mencakup masalah pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian hortikultura, penanganan panen, pasca panen pengolahan hasil pemasaran dan peningkatan mutu hasil hortikultura serta melakukan evaluasi penerapan standar perbenihan hortikultura.
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis produksi peternakan, pengolahan hasil dan pemasaran produk hasil peternakan yang mencakup pemetaan potensi kawasan peternakan dan peningkatan populasi ternak yang meliputi ternak unggas, ternak kecil dan ternak besar.
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengelolaan air, lahan dan perluasan areal dimana secara sistematis tercakup masalah pengembangan sumber air, rehabilitasi dan optimasi air, konservasi serta kelembagaan, dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, serta pengembangan perluasan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.

- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, perlindungan tanaman, pupuk pestisida serta alat dan mesin pertanian dimana secara sistematis tercakup monitoring, peramalan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura, penggunaan pupuk dan pestisida serta pengembangan alat dan mesin pertanian dan kelembagaan.
- f. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura yang mencakup pengumpulan bahan pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kultivar serta melakukan analisa mutu benih dan pengawasan mutu benih.
- g. Melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak, mutu semen beku dan pakan ternak termasuk menyiapkan paket teknologi inseminasi buatan dan bioteknologi budidaya.
- h. Melakukan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura serta pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak dan pemusnahan produk hasil peternakan yang tidak ASUH.
- i. Melaksanakan kegiatan teknis dibidang benih padi, hortikultura dan palawija yang mencakup pengadaan dan penyediaan benih sumber benih dasar dan benih pokok serta melakukan pengembangan teknologi produksi benih padi.



- j. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi statistik dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Nasional.
- k. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimtek dan magang bagi aparatur dan petani/peternak guna meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya pertanian dan peternakan.

Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan juga harus mampu menyikapi perkembangan masyarakat yang demokratis, transparan, sejalan dengan perkembangan dan informasi, oleh karenanya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan Kabupaten Nunukan, yaitu peningkatan hasil-hasil pertanian dan peternakan terutama yang berkaitan dengan swasembada pangan.

Produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 yaitu 38.454 ton, dimana produksi padi Kecamatan Nunukan 416 ton, Kecamatan Nunukan Selatan 2.975 ton, Kecamatan Sebatik 8.409 ton, Kecamatan Sebatik Barat 4.767 ton, Kecamatan Sebuku 849 ton, Kecamatan Sembakung 3.631 ton, Kecamatan Lumbis 2.912 ton, Kecamatan Krayan 11.416 ton, dan Kecamatan Krayan Selatan 3.125 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan 140.842 jiwa dimana Kecamatan Nunukan 53.646 jiwa, Kecamatan Nunukan Selatan 12.283 jiwa, Kecamatan Sebatik 22.054 jiwa, Kecamatan Sebatik Barat 10.400 jiwa, Kecamatan Sebuku 14.899 jiwa, Kecamatan Sembakung 8.153 jiwa, Kecamatan Lumbis 9.906 jiwa, Kecamatan Krayan 7.245 jiwa dan Kecamatan Krayan Selatan 2.256 jiwa.

Secara umum Kabupaten Nunukan berdasarkan angka produksi telah dapat mencukupi kebutuhan bahan pokok pangan (dilihat dari rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 139,15 kg/kapita/tahun). Namun hubungan antar kecamatan yang masih sulit, menyebabkan kelebihan produksi di satu kecamatan tidak dapat dipasarkan ke kecamatan lain dalam satu kabupaten, melainkan dipasarkan ke kabupaten lain, bahkan dipasarkan keluar negeri.

Realisasi panen durian tahun 2010 mencapai 13.730 pohon dengan produksi 1.540 ton. Sentra durian terdapat di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sembakung dan Lumbis. Realisasi luas panen pisang mencapai 13.734 pohon dengan produksi 23.288 ton. Sentra tanaman pisang terdapat di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat. Sedangkan realisasi panen rambutan 19.775 pohon dengan produksi 1.803 ton. Produksi buah-buahan, jika dihitung konsumsi buah secara normal yaitu 0.6 kg/kapita/hari, sebenarnya belum dapat memenuhi kebutuhan buah-buahan sendiri, apalagi untuk buah-buahan yang memenuhi standard internasional (mutu buah untuk ekspor).

Kabupaten Nunukan selain sebagai produsen masih merupakan pasar yang cukup potensial untuk produk buah-buahan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir sub sektor pertanian tanaman pangan adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua terbesar pada sektor pertanian di bawah sub sektor kehutanan dengan nilai Rp 460,985 milyar dari Rp 1.857,030 milyar sumbangan sektor pertanian. Sedangkan sub sektor peternakan menyumbang PDRB sebesar Rp 209,641 milyar dari sektor pertanian. Laju pertumbuhan sub sektor peternakan pada tahun 2010 yaitu 1,24% dari 1,03% laju pertumbuhan sektor Pertanian. Namun laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan mengalami

penurunan yaitu sebesar -5,18%. PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan 32,25% dari PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2010, sub sektor peternakan 14,68% dari PDRB Kabupaten Nunukan.

Tahun 2012-2016 untuk sub sektor tanaman pangan diarahkan untuk pengembangan komoditas padi dan ubi kayu. Produksi padi untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan maka produksi padi harus mencapai 49.000 ton/tahun. Sedangkan kemampuan produksi padi tahun 2010 hanya mencapai 38.454 ton. Jadi diperlukan penambahan areal sekitar 2.940 ha. Ubi kayu ditargetkan mencapai produksi 17.200 ton, yang diperkirakan memerlukan perluasan lahan sebanyak 1.275 ha. Pengembangan komoditas padi, juga diarahkan untuk melestarikan Padi Adan yang tersebar di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, sebagai salah satu plasma nutfah Kabupaten Nunukan.

Pengembangan Padi Adan ditujukan untuk pengembangan genetik, penanganan pasca panen dan penataan pemasaran. Pada sub sektor hortikultura, pembangunan diarahkan untuk pengembangan komoditas buah-buahan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi ciri khas Kabupaten Nunukan. Untuk tahun 2012-2016, pengembangan hortikultura berfokus pada buah pisang, durian dan jeruk. Pisang direncanakan untuk dilakukan perluasan areal 500 ha, durian 300 ha dan jeruk 500 ha. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura direncanakan akan didukung oleh pengembangan irigasi, pembuatan jalan usaha tani dan jalan produksi, peningkatan penggunaan alat mesin produksi, perbaikan manajemen produksi, penanganan pasca panen dan mendukung pengembangan industri kecil pengolah hasil pangan dan buah-buahan.

Pembangunan sub sektor peternakan tahun 2007-2011 merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan sebelumnya. Ke depan tantangan yang dihadapi akan sangat sulit. Konsumsi harapan pangan asal ternak penduduk Indonesia menurut Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional LIPI tahun 1998 harus setara daging 10,3 kg, telur 6,5 kg dan susu 7,2 kg/kapita/tahun, untuk mencapai standard gizi protein hewani asal ternak 6 g/kapita/tahun.

Kabupaten Nunukan pada tahun 2004, konsumsi pangan asal ternak mencapai setara daging 9,28 kg dan telur 1,34 kg/kapita/tahun atau mencapai 5,18 kg protein asal ternak/kapita/hari. Jika melihat struktur konsumsi, penduduk Nunukan hampir bisa memenuhi kebutuhan protein asal ternak, apalagi jika protein susu olahan diperhitungkan dalam konsumsi. Hanya saja harus diingat, struktur konsumsi tersebut 85-90% masih ditopang import. Kemampuan swasembada hanya mencapai 15% dari kebutuhan. Untuk mencapai swasembada penuh, dibutuhkan penyediaan 10 kg konsumsi daging asal ternak/kapita/tahun.

Dalam rangka mencapai swasembada daging seperti yang diinginkan Pemerintahan Propinsi, konsentrasi penyediaan daging hanya difokuskan pada penyediaan daging sapi. Selain untuk mempermudah perhitungan, juga karena konsumsi daging ternak besar umumnya disediakan oleh daging sapi. Menurut perhitungan tersebut untuk sapi saja pada tahun 2011, Kalimantan Utara membutuhkan populasi ideal sebanyak 600.000 ekor, sementara pada tahun 2010 hanya tersedia populasi sapi 107.200 ekor atau 18% dari seharusnya. Hal yang sama juga dihadapi oleh Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan peta kemampuan dan pengalaman selama ini, dibuat 3 skenario pencapaian swasembada. Skenario pertama adalah skenario sangat

optimis, diasumsikan bisa mencapai konsumsi 10 kg/kapita/tahun dari produksi lokal; skenario kedua adalah skenario optimis, dengan asumsi pertumbuhan 50%, yaitu 7.5 kg/kapita/tahun dan skenario ketiga adalah skenario realistik, yaitu kondisi tanpa pertumbuhan dengan pencapaian swasembada 5 kg/kapita/tahun, sama seperti saat ini, hanya import diasumsikan tidak ada lagi.

Skenario pertama membutuhkan populasi ideal 37.000 ekor sapi, sedangkan kenyataannya pada tahun 2010 Kabupaten Nunukan hanya memiliki populasi 5.500 ekor sapi saja, atau 15% dari seharusnya. Untuk itu diperlukan pertumbuhan konstan sebesar 20% per tahun atau setara dengan 6.300 ekor sapi. Jadi setiap tahun populasi harus tumbuh 115% dari populasi sekarang. Hal yang mustahil dicapai. Skenario kedua membutuhkan populasi sapi 25.200 ekor sapi. Dari populasi sekarang harus terjadi kenaikan sebesar 19.700 ekor atau 4 kali lipat dari populasi sekarang. Skenario ini mensyaratkan pertumbuhan konstan 3.900 ekor per tahun atau 70,91% dari populasi saat ini. Ini pun belum mungkin akan tercapai. Dengan skenario ketiga dicoba untuk realistik. Tidak dibayangkan ada kenaikan konsumsi. Konsumsi diasumsikan tetap seperti saat ini, hanya menihilkan import, atau tetap ada import, tetapi sampai konsumsi 5 kg/kapita/tahun, dipenuhi dari ternak lokal.

Skenario ini membutuhkan sapi sebanyak 17.000 ekor, sehingga masih defisit 11.500 ekor. Keadaan ini mensyaratkan bahwa pertumbuhan konstan per tahun sebanyak 2.300 ekor atau 41,82% dari populasi tersedia. Untuk mencapainya perlu dibuat lagi skenario peran pemerintah. Skenario pertama adalah skenario dominan, yang mensyaratkan peran pemerintah sebesar 75%, skenario kedua adalah skenario pengimbang, peran pemerintah masih sebesar

50%, dan skenario ketiga adalah skenario pendamping, dengan peran pemerintah dalam penyediaan populasi sapi hanya sebesar 25%.

Skenario ketiga ini adalah skenario ideal yang sedang menjadi trend bagi pembangunan di Indonesia yang menonjolkan peran swasta dan masyarakat. Pemerintah akan bertindak sebagai pengisi kekosongan celah pembangunan yang tidak mungkin diisi oleh swasta dan masyarakat, misalnya peningkatan derajat kesehatan ternak, pembibitan, pemuliabiakan, penyediaan sarana dan regulasi yang proaktif. Dengan cara ini anggaran yang tersedia akan lebih didayagunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan peternakan.

Peran 75% pemerintah dalam penyediaan sapi mensyaratkan tiap tahun pemerintah harus menyediakan 1.700 ekor sapi bibit, peran 50% masyarakat mensyaratkan pemerintah menyediakan 1.150 ekor sapi per tahun dan peran 25% masyarakat mensyaratkan penyediaan 575 ekor sapi bibit per tahun. Peran pemerintah ini membutuhkan anggaran minimal sebesar 4,6 milyar per tahun.

Konsekuensi pilihan skenario ini adalah meningkatkan peran swasta dan masyarakat. Selama ini sektor ini belum digarap secara maksimal, padahal potensinya sangat besar untuk mendukung pencapaian program pembangunan peternakan yang diharapkan. Perlu pemikiran cerdas dan progresif untuk menarik swasta dan masyarakat terlibat dalam pembangunan peternakan.

Pada tahap awal mungkin diperlukan semacam lokakarya dan kampanye untuk menyatukan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan peternakan dan pada tahap berikutnya diperlukan pengerahan modal yang terarah oleh swasta dan masyarakat sebesar 1,8 milyar per tahun untuk bersama-sama membangun peternakan, mengingat Kabupaten

Nunukan memiliki potensi satuan ternak sebesar 169.342 dan baru digunakan sebanyak 6.014 ST, sehingga masih terdapat kekosongan sebesar 163.327 ST.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.**

Proses pemberdayaan (*empowerment*) peternak adalah suatu kondisi yang dapat menumbuhkan kemandirian petani-peternak melalui pemberian kekuatan atau daya. Pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan. Petani juga diberi kesempatan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan respon terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya.

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di pedesaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan merupakan salah satu subsidi dari pemerintah untuk rumah tangga petani miskin berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk barang sarana produksi pertanian maupun dalam bentuk modal keuangan. Subsidi dipandang sebagai pajak negatif (*negative tax*), karena subsidi menambah pendapatan nyata.

Sebagaimana halnya pajak, manfaat pemberian subsidi terbagi-bagi antara produsen dan konsumen, tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. Jika

subsidi diberikan kepada petani, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Hal ini berimplikasi kepada penurunan harga disertai penambahan output hasil pertanian. Efek positif dari pemberian subsidi adalah peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan output.

Operasional penyaluran dana Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggota. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan antara lain: memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota (Kementerian Pertanian, 2011).

Tujuan utama dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh pertanian, dan penyelia mitra tani.



- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan jejaring atau mitra kelembagaan keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
- b. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008, pelaksanaannya melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut: (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan; (2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau; (3) Fasilitasi modal usaha bagi petanikecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; 4) Penguatan kelembagaan gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki petani.

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- a. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan kepada petani, buruh tani

dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan

- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan.
- b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang.

Untuk mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan berjalan lancar, maka dibentuklah suatu tim pemantau, pembinaan, dan pengendalian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang menangani Bantuan Lansung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di tingkat kabupaten/kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di lapangan nantinya.

Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan provinsi hingga tim teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan pemberian bantuan bibit sapi melalui kelompok tani hal ini dilakukan dengan tujuan diharapkan anggota kelompok tani/ternak dapat mengembangkan jumlahnya dan dimanfaatkan sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan cara menjual hasil ternaknya jika ada keperluan mendesak seperti pendaftaran anak sekolah atau biaya perawatan rumah sakit”.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha Bapak Junaidi, SP. yang mengatakan Bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan dilakukan Melalui usulan dari kelompok tani kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Disperanak Kab. Nunukan yang dengan tujuan Meningkatkan SDM petani/peternak dan kesejahteraannya”.

Hal sama pula diungkapkan Oleh Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo Bapak Yoktan R. Oranay yang mengatakan bahwa:

“Mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui agribisnis peternakan yaitu pada tahap awal mengajukan proposal permohonan bantuan selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi serta penentuan calon penerima dan calon lokasi”.

Adapun terkait sumber dana Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan mengatakan bahwa:

“Sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I) yang pada waktu itu adalah melalui Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan sejak tahun 2013 berpindah melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Nunukan (APBD II) melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan telah dipahami baik dari sisi pemerintah daerah ataupun dari kelompok tani, yang mana dalam tujuannya yaitu untuk mensejahterakan kelompok tani yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Dalam wawancara selanjutnya tentang persyaratan masyarakat untuk menjadi anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Persyaratan masyarakat untuk dapat menjadi anggota kelompok tani dalam program tersebut adalah mempunyai KTP dengan domisili yang sama dengan kelompok tani yang sama, mempunyai lahan/tempat untuk penggembalaan ternak, mempunyai kandang atau bersedia membuat kandang sapi serta mempunyai pengalaman dalam hal beternak terutama ternak sapi”.

Pernyataan dari Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan diperkuat oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Syarat masyarakat untuk menjadi anggota kelompok adalah identitas diri berupa KTP dan KK yang masih berlaku. Domisili anggota bisa berdasarkan kedekatan lokasi/hamparan tempat lokasi kegiatan, atau berdasarkan kedekatan domisili”.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo Bapak Yoktan R. Oranay yang mengatakan bahwa:

“Anggota kelompok tani ditentukan berdasarkan tingkat kesanggupan peternak dalam memelihara dan merawat ternak baik secara individu maupun secara berkelompok, memiliki lahan penanaman hijauan makanan ternak dan bersangkutan berada pada lokasi atau wilayah binaan dari PPL setempat”.

Kemudian anggota kelompok tani Bapak Arifuddin mengatakan bahwa:

“Cara menentukan yang berhak menjadi anggota kelompok tani adalah dengan rapat anggota kelompok yang didampingi oleh perangkat desa dan juga petugas penyuluh lapangan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses atau prosedur untuk menjadi anggota kelompok tani sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari paham dan mengertinya kelompok tani dalam menentukan kelompok tani secara prosedur administrasinya.

Wawancara selanjutnya yaitu terkait proses sosialisasi dan seleksi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Kabid Informasi Teknologi dan Bina Usaha Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Junaidi, SP. Yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dan seleksi umumnya dilakukan oleh petugas dinas, juga dibantu petugas penyuluh. Pelaksanaan seleksi biasanya dimulai dari hal administrasi, kemudian pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian data, dilanjutkan dengan penilaian”.

Hal yang sama diungkapkan Kabid Produksi dan Sumber Daya Ternak

Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat membentuk kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan, sedangkan proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima bantuan adalah dengan bertatap muka secara langsung dengan anggota kelompok tani yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan ke Dispertanak Kab./Kota terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh Lapangan kemudian melakukan wawancara dengan para anggota kelompok tani terkait hal-hal

mengenai tata cara beternak untuk mengetahui kesiapan dan kelayakan para anggota menerima bantuan. Selain itu, petugas CPCL juga mengumpulkan informasi-informasi terkait anggota kelompok tani calon penerima dari PPL dan aparat desa setempat”.

Hal senada diungkapkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Bapak Nirwana, S.Pt. M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Proses penentuan calon penerima bantuan yang dianggap mampu dan layak menerima bantuan yaitu melalui pertemuan rutin dan mengajukan persyaratan yang harus ditaati”.

Kemudian hal sama pula diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani yang mengatakan bahwa:

“Proses sosialisasi yang dilakukan Dispertanak Kabupaten Nunukan dengan menghadiri rapat desa dan mendatangi petani/peternak untuk melakukan sosialisasi program”.

Dari hasil wawancara tersebut, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari proses sosialisasi dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan tersampaikan melalui pertemuan atau rapat dengan kelompok tani.

Terkait dengan proses pemberian bantuan Kepala Dinass Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si. mengatakan bahwa:

“Proses pemberian bantuan dilakukan setelah proses CPCL dan verifikasi dilakukan hingga diperoleh jumlah kelompok tani/ternak sesuai dengan yang tertera dalam anggaran. Bantuan sapi bibit yang diberikan pada umumnya berjumlah 2 ekor sapi betina untuk setiap anggota kelompok dan 1 ekor sapi pejantan untuk ketua kelompok atau anggota kelompok tani yang dianggap mampu memelihara sapi pejantan atau anggota kelompok tani yang lokasi berada di tengah-tengah anggota kelompok tani

lain sehingga jika nantinya ada sapi betina yang birahi, sapi pejantan tersebut dapat digiring ke kandang sapi betina yang birahi tersebut”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada kegiatan yang berupa bantuan, Dinas memberitahukan kepada PPL untuk disosialisasikan kepada kelompok tani. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan atas rekomendasi kepala desa dan camat setempat. Jika kelompok tani tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan, dalam penyerahannya Dinas memberitahukan kepada desa dan camat. Selain itu dalam musrembang Dinas melakukan sosialisai terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti paket bantuan apa yang akan diberikan kepada masyarakat”.

Adapun prosesnya menurut beliau adalah sebagai berikut:

“Petani mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, cq. Kadispertanak Kabupaten Nunukan, kemudian Dinas mempelajari proposal-proposal yang diusulkan oleh kelompok tani, dan mengecek kelengkapan administrasi, kemudian melakukan CP/CL untuk mecegah adanya kelompok tani fiktif juga untuk mengetahui kesiapan para kelompok tani dalam menerima paket bantuan yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut diatas Dinas akan menilai kelompok mana yang patut/layak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Setelah ditetapkan, maka dibuatkan SK penerima bantuan”.

Dari hasil wawancara, bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Nunukan dilakukan melalui proses atau tahapan yang dilakukan oleh kelompok tani dari tahapan sosialisasi, pengajuan sampai pada penerimaan sudah berjalan dengan baik.

Terkait dengan bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kepala Dinas mengatakan bahwa:

“Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok tani penerima bantuan adalah dengan melakukan kunjungan secara terjadwal kepada kelompok tani, untuk memberikan penyuluhan tentang tata cara beternak yang baik



meliputi cara pemberian pakan sesuai kebutuhan ternak, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit/gangguan kesehatan ternak secara sederhana, cara pertolongan pertama jika ada ternak yang sakit; melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). Pelatihan yang diberikan kepada peternak salah satunya adalah pelatihan pengolahan pakan ternak sederhana dan pelatihan pengolahan kotoran ternak untuk pupuk kandang atau biogas serta ada beberapa anggota kelompok tani/ternak yang dikirim pelatihan sebagai petugas IB”.

Hal yang sama diungkapkan Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Dari pihak Dispertanak Kabupaten Nunukan biasanya penanggung jawab kegiatan ataupun siapa saja yang pendidikannya memiliki *back ground* dibidang peternakan melakukan kunjungan langsung dilapangan (penerima bantuan) dan saling berdiskusi dua arah, dimana petani menyampaikan keluhan berupa hambatan ataupun sesuatu yang mereka anggap suatu keberhasilan kepada petugas tersebut, kemudian diberikan masukan oleh petugas tersebut. Untuk pelatihannya sendiri kami (Dispertanak) juga mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan peternak, berupa BIMTEK misalnya”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Bapak

Nirwana, S.Pt. M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Penyuluhan dilakukan secara rutin kepada anggota kelompok tani dan difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat. Penyuluhan dilakukan oleh PPL yang telah diberikan tugas oleh dinas terkait sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah binaan”.

Adapun menurut ketua dan anggota kelompok tani, bahwa:

“Penyuluhan/pembinaan/pelatihan dilakukan oleh petugas teknis dari provinsi atau kabupaten/kota dan didampingi oleh PPL setempat. Yang memberikan penyuluhan adalah petugas penyuluh lapangan, yang melakukan pembinaan dan pelatihan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal

ini terlihat dari dilakukannya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani.

Terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan akses jaringan internet yang mempengaruhi proses pengajuan e-proposal, kesulitan menjangkau daerah-daerah yang terbatas transportasinya, keterbatasan kemampuan kelompok tani dalam berbahasa Indonesia sehingga menghambat proses CPCL”.

Hal lain diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan yaitu masyarakat lebih fokus pada mata pencaharian pokok sebagai petani rumput laut dan untuk memelihara ternak hanya sebagai usaha sampingan selain sistem bagi hasil atau perguliran belum dipahami sepenuhnya oleh anggota kelompok tani”.

Adapun dari pernyataan anggota kelompok tani terkait dengan kendala yang dihadapi, mereka mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi sering pada tataran teknis yaitu dalam proses penggemukan sapi diantaranya kurangnya pengetahuan peternak dalam penggemukan sapi, ternak dipelihara tanpa dikandangkan, kurangnya penggunaan suplemen nutrisi untuk penggemukan serta kurangnya penanaman HMT unggul”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kadis

Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakann terdapat beberapa kendala diantaranya jumlah anggaran yang terbatas, letak geografis, dan SDM.

Kemudian terkait dengan pedoman pelaksanaan serta pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Perencanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan adapun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan ke suatu daerah adalah potensi wilayah meliputi luas lahan penggembalaan, SDM calon penerima meliputi pengalaman beternak; pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; kemampuan mendeteksi birahi ternak; akses transportasi yang memudahkan pengawasan dan pembinaan kelompok tani/ternak”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan program saya pikir sudah sesuai dengan pedoman yang ada kita lakukan pengkajian terhadap potensi yang dimiliki untuk mengembangkan agribisnis peternakan. Adapun pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan: Pertimbanganannya: di wilayah tersebut memiliki populasi ternak (sapi) yang tinggi, akses untuk pemasaran mudah dan akses sumber modal gampang”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pedoman pelaksanaan serta pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan sudah sesuai dengan pedoman yang ada.

Selanjutnya terkait dengan bantuan dan jumlah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi buatan. Bantuan bidang pertanian berupa bantuan bibit hortikultura, bibit durian, alat pertanian dan optimalisasi lahan. Jumlah bantuan yang diberikan pada saat ini sebanyak 2 ekor sapi /kk dengan jumlah anggota 20-25 anggota/kelompok tani”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kab. Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi buatan. Bantuan ke kelompok tani sebanyak 2 ekor/KK dengan jumlah anggota 20-25 orang/ kelompok tani”.

Ketua Kelompok Tani membenarkan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berupa bibit ternak, bibit hijauan makanan ternak dan obat-obatan ternak. Nominal bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit ternak 2 ekor/KK dan bibit hijauan makanan ternak 1 paket”.

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa bantuan serta jumlah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan yaitu berupa bibit sapi dengan jumlah 2 ekor /KK.

Kemudian terkait dengan peran pihak-pihak terkait dalam rogram pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di

Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kepala Dinass Pertanian,  
Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Peran aparat dalam membentuk kelompok tani adalah memfasilitasi proses pembentukan kelompok melalui musyawarah serta peran PPL yang sangat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian ternak sapi bibit karena dapat bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan ini. PPL juga bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi proposal yang diajukan kelompok tani, menyeleksi kelengkapan administrasi proposal, memfasilitasi proses CPCL hingga penyerahan bantuan ternak serta membantu pengawasan perkembangan ternak bantuan sapi. Petugas Penyuluh Lapangan berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Peran aparat setempat sangat mendorong warganya agar mereka dapat membentuk kelompok, hal ini didasarkan karena dengan kelompok tani harapan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah lebih besar. Peran lain yang cukup membantau adalah PPL penyuluh tersebut yang senantiasa aktif memberikan pengarahan. Selain penyuluh tersebut Dispertanak juga aktif memberikan masukan khususnya dalam membina kelompok penerima”.

Adapun dari pernyataan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mengatakan terkait peran pihak terkait mengatakan bahwa:

“Peranan Kepala Desa dalam proses pembentukan kelompok tani pada dasarnya adalah ikut mendukung dalam rangka pembangunan agribisnis peternakan. Adapun tugas saya sebagai PPL dalam pengembangan agribisnis peternakan yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan atau pemahaman tentang cara beternak yang baik untuk kesejahteraan anggota. Tujuan diikutsertakan PPL dalam pembangunan agribisnis peternakan yaitu sebagai wadah aspirasi peternak dalam menyampaikan ide dan gagasan atau usulan kepada pemerintah.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Petugas penyuluh lapangan berasal anggota PNS/NonPNS yang diberikan tugas sesuai tupoksi yang diberikan dari dinas terkait. Tugas yang diemban oleh petugas PPL yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan, memberikan pemahaman dalam budi daya ternak, melaksanakan tugas

sesuai tupoksi yang diberikan pemerintah. Bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh PPL yaitu membuat kegiatan harian atau bulanan yang selanjutnya direkap untuk dilaporkan ke atasan atau dinas terkait”.

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa terkait dengng peran para pihak terkait dalam program rogram pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan sudah sesuai dengan tgas dan tupoksinya masing-masing, Kepala Desa sebagai pemerintahan terbawah berperan membentuk kelompok tani sedangkan penyuluh/ PPL memeberikan pemahaman kepada para kelompok tani.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah program monitoring dan pembinaan kelompok tani. Pelatihan atau penyuluhan yang diberikan kepada para anggota kelompok tani adalah pelatihan pengolahan pakan ternak secara sederhana dan ada beberapa anggota kelompok tani yang dikirim pelatihan petugas IB. Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah cara pengolahan pakan ternak berbahan jerami padi secara sederhana yaitu dengan metode amoniasi dan pembuatan silase, sedangkan pada pelatihan petugas IB materi yang diberikan adalah pengetahuan deteksi birahi dan pelaksanaan IB. Pelatihan pengolahan pakan ternak dilaksanakan selama 3 hari sedangkan pelatihan IB bagi kader dilaksanakan selama 21 hari”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani, Bapak Yoktan R.

Oranay yang mengatakan bahwa:

“Jenis materi yang diberikan dalam pemantapan pemberdayaan agribisnis peternakan yaitu teknik memelihara ternak, penerapan teknologi tepat guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan hijauan makanan ternak. Waktu yang dibutuhkan dalam pemantapan kegiatan tersebut yaitu 1-2 tahun setelah terima bantuan”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan penyuluhan atau pelatihan merupakan sarana untuk memberikan edukasi kepada petani tentang teknis pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan”.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan adapun kegiatannya terkait dengan pakan ternak dan penerapan teknologi tepat guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan penghijauan makanan ternak.

Terkait dengan realisasi hasil dari adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si. mengatakan bahwa:

“Realisasi bantuan sapi bibit yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan peternak karena dengan adanya sapi-sapi tersebut yang telah berkembang biak dapat disimpan sebagai cadangan dana untuk keperluan penting seperti pendidikan anak, biaya perawatan rumah sakit atau untuk acara keluarga serta dapat dijadikan modal usaha”.

Kabid Produksi dan Sumber Daya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu,

M.Si menambahkan bahwa realisasi hasil dari program tersebut 100% baik.

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas dapat dikatakan bahwa realisasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah terrealisasikan dengan baik.

Secara umum dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan sudah berjalan dengan baik dimulai dari tahap mekanisme, sosialisasi, penyampaian bantuan serta proses pendampingan dan penyuluhan dapat terealisasi sesuai acuan yang ada.

## **2. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.**

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan yang telah berlangsung di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan diawali dari proses perencanaan program diawali dari proses persiapan sebelum dana program dicairkan. Proses persiapan tersebut meliputi kegiatan identifikasi dan verifikasi desa penerima program dilakukan oleh penyuluh pendamping. Identifikasi potensi Kelurahan Mansapa dilakukan dengan cara anjarsana ke rumah masyarakat petani, diskusi serta kunjungan langsung ke lapangan. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisai program yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program. Proses sosialisai program dilakukan dari tingkat propinsi hingga tingkat desa penerima program.

Sosialisasi di tingkat Provinsi dilakukan sekali pada saat awal program dicanangkan. Proses perencanaan program kurang berjalan dengan baik, demikian pula pelaksanaan program kurang sesuai dengan pedoman teknis program. Adapun proses pelaporan program yang berjalan dibuat didasarkan pada pelaporan tahun pertama dan pelaporan tahun kedua. Laporan perkembangan



pelaksanaan program pada tahun pertama dibuat berdasarkan panduan dan pendampingan oleh penyuluh pendamping, sehingga memang kurang sesuai dengan pedoman teknis program.

Laporan perkembangan pada tahun yang kedua setelah program berjalan sudah berdasarkan panduan penyelia mitra tani dan penyuluh pendamping. Hasil pelaporan dari tahun pertama maupun pada tahun kedua bila dilihat memang kurang mampu menggambarkan perkembangan program secara keseluruhan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pengurus, maka laporan hanya mampu disajikan dalam bentuk yang sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si. tentang pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan terkait dengan indikator keberhasilan, mengatakan bahwa:

“Tingkat keberhasilan program ini tentunya belum 100% berhasil dikarenakan masih ada kendala dan masalah yang perlu diperbaiki atau diselesaikan, tetap tentunya program ini sudah cukup baik hal ini terlihat dari Indikator keberhasilan program ini yang paling mudah diukur adalah peningkatan populasi sapi di Kabupaten Nunukan secara umum dan di Kelurahan Mansappa secara khusus, selain itu ada peningkatan pengetahuan petani tentang cara pengolahan pakan, cara pengolahan limbah, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit ternak dan pengobatannya secara sederhana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambah banyak anak petani/peternak yang bisa kuliah”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Indikator keberhasilan dapat dilihat dari bertambahnya warga yang menjadikan agribisnis peternakan sebagai usahanya, adanya nilai tambah/pendapatan yang diterima oleh peternak (pendapatan petani makin

tinggi), terbentuknya usaha lain yang terkait dengan agribisnis peternakan”.

Adapun menurut Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha mengatakan bahwa:

“Keberhasilan program ini belum 100% akan tetapi Keberhasilan dari program ini sudah bisa dikatakan baik hal dapat kita lihat dari jumlah Populasi ternak yang bertambah dan adanya usaha ekonomi mikro petani dari bidang peternakan”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dimana populasi ternak semakin bertambah”.

Adapun menurut Ketua Kelompok Tani, ia mengatakan bahwa:

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa program ini sudah berhasil sepenuhnya akan tetapi pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa sudah menunjukkan kemajuan yang berarti tetapi masih ada kendala yang dihadapi khususnya dalam hal pengelolaan hijauan makanan ternak pada musim kemarau”.

Hal yang sama diungkapkan anggota kelompok tani, bahwa:

“Indikator keberhasilan dari program ini yaitu kemajuan berupa jumlah ternak yang semakin banyak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan salah satu indikatornya adalah bertambahnya populasi binatang ternak dan munculnya kegiatan ekonomi lainnya yang menyebabkan kesejahteraan petani meningkat.

Selain daripada itu bahwa hal yang terkait dengan progres atau kemajuan dalam Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan

Kabupaten Nunukan menurut Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab. Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si mengatakan bahwa:

“Kemajuan yang ditunjukkan sangat berarti yaitu dapat dilihat dari semakin banyaknya minat masyarakat untuk beternak sapi”.

Hal sedikit berbeda diungkapkan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha yang mengatakan bahwa:

“Kemajuan yang dicapai cukup berarti, tapi belum sesuai harapan yang ideal karena hal-hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi”.

Hal lain pula dikatakan oleh Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami puas dengan hasil yang dicapai akan tetapi yang kami inginkan adalah semakin banyaknya jumlah rantai usaha antara satu dengan yang lain sangat terkait. Sebagai contoh agribisnis usaha penggemukan sapi, yang kami harapkan disini jumlah suatu usaha yang mendukung usaha penggemukan tersebut, seperti tumbuhnya usaha masyarakat yang menyediakan pakan konsentrat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kemajuan dalam Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya kemajuan, akan tetapi perlu peningkatan dalam bidang lainnya seperti bidang agribisnis yang terkait dengan peternakan.

Dalam Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan tentunya mengalami hambatan, adapun menurut Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat program ini antara lain kurang kompaknya anggota kelompok tani/ternak dalam menyamakan visi dan misinya dalam mengelola bantuan ternak sapi ini sehingga terkadang ada anggota kelompok yang bisa sukses dan ada anggota kelompok tani/ternak yang gagal dalam mengembangkan ternaknya”.

Hal lain diungkapkan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha yang mengatakan bahwa:

“Hambatan yang ada dalam pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan adalah sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang ada”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pemahaman peternak terhadap teknologi tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi yang intens demi peningkatan SDM peternak”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota kelompok tani yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menghambat: kurangnya pemahaman peternak terhadap teknologi penerapan tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi lagi demi peningkatan SDM petani peternak”.

Adapun menurut Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. mengatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi penghambat: Sumber bahan baku pendukung dan modal tambahan, untuk kelanjutan program bantuan”.

Dari hasil wawancara diatas terkait hambatan dalam pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan adalah faktor sumber daya manusiannya dan faktor anggaran yang terbatas.

Terkait dengan harapan yang ingin dicapai dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa diharapkan dapat ditindak lanjuti mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik secara luas maupun secara individu”.

Hal lain diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha yang mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai harapan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan khususnya Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan yaitu Meningkatnya kreatifitas kelompok tani, meningkatnya peran penyuluh lapangan, meningkatnya anggaran untuk bantuan”.

Adapun Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. mengatakan bahwa:

“Harapan kedepan terhadap program agribisnis peternakan ini tetap dijalankan tetapi dengan memperbaiki kekurang-kurangan dan masalah yang dihadapi selama ini”.

Selanjutnya harapan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan diungkapkan oleh petugas penyuluhan yang mengatakan bahwa:

“Harapan saya kedepan diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk peningkatan SDM petani peternak agar bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya”.

Adapun harapan dari Ketua Kelompok Tani terkait dengan program pemberdayaan masyarakat melalui usaha agribisnis peternakan yaitu:

“Harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok tani dengan adanya keterlibatan semua anggota kelompok tani. Bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran, Kelompok tani calon penerima bantuan harus diseleksi lebih ketat”.

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota kelompok tani terkait harapannya terhadap program ini yang mengatakan bahwa:

“Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan SDM peternak. Diperlukan peran aktif dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam mensosialisasikan, membina dan memberikan pelatihan kepada kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan beternak agar bantuan dari pemerintah bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa terkait harapan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, kelompok tani mempunyai harapan bahwa program ini terus berlanjut dengan memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas secara umum pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dapat dikatakan pencapaiannya sudah baik walaupun belum sepenuhnya berhasil dilihat dari indikator keberhasilan yaitu meningkatnya jumlah populasi sapi serta kemajuan yang menunjukkan meningkatnya ekonomi petani dan makin bertambahnya minat masyarakat untuk untuk beternak.

## C. Pembahasan

### 1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” seperti yang dikatakan oleh Chamber (1995), dalam Kartasmita (1996). Konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu (Kartasmita, 1996).

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah, khususnya pada bantuan ternak sapi bibit maka strategi dan proses pemberdayaannya praktis merupakan penerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat sehingga sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga dengan demikian, rakyat dan lingkungannya akan mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis.

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik. Penilaian ini terkait dengan mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Nunukan serta pihak terkait yang melakukan tahapan-tahapan secara prosedural dari sosialisasi hingga pendampingan atau penyuluhan.

Mengemukakan aspek diatas dalam konteks pemberdayaan kelompok tani meliputi tahap identifikasi keadaan petani/kelompok tani, perencanaan kegiatan kelompok tani dan perencanaan pendampingan oleh penyuluh, pelaksanaan rencana-rencana tersebut, monitoring pelaksanaan rencana-rencana tersebut, dan evaluasi pelaksanaan rencana-rencana, serta perencanaan kembali tahun berikutnya. Proses penerapan ini merupakan rangkaian tahapan atau daur masing-masing bagian saling berhubungan erat sebagai kerangka dasar bagi petani/kelompok tani dalam melakukan setiap program.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan faktual, logis, dan operasional serta dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang dianggap oleh kelompok tani terkait (pendekatan partisipatif). Hal tersebut merupakan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Faktor terpenting dari merupakan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dalah proses penyuluhan atau pendampingan. Pendamping menurut Ismawan (2000) adalah mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat melaksanakan agenda-agenda dan mencapai tujuan.

Keberhasilan implementasi program pemberdayaan ini pula tidak lepas dari faktor modal atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok



tani. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dengan kemitraan yang erat antara masyarakat yang sementara berkembang. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengolahan surplus usaha.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat pelaksana dan pengelola (*acceptable*), kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

## **2. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan**

Melihat capaian hasil pelaksanaan program PUAP maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan program memang memiliki beberapa kekuatan maupun kelemahan. Hal ini diketahui dari pelaksana yang menjalankan program secara langsung. Kajian hasil digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan pemerintah selanjutnya. Kekuatan program yang utama adalah memberikan dana hibah sehingga dalam konsep pemberdayaan, masyarakat telah diberi keleluasaan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan sendiri.

Penggunaan dana juga dapat dilakukan sesuai potensi masyarakat sehingga akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Proses sebelum pelaksanaan hingga pada saat realisasi program cukup mudah, baik dari proses pembuatan proposal yang harus dipenuhi oleh Gapoktan maupun pada saat pencairan dana ke Gapoktan. Sisi kekuatan lain dari program ini memberikan nilai pendidikan bagi masyarakat terutama karena dana bantuan tidak diberikan secara cuma-cuma tetapi harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat juga semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani terutama dalam pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin.

Evaluasi pelaksanaan program PUAP, dilihat dari aspirasi-aspirasi masyarakat merupakan kekuatan yang ditampung dalam satu wadah yang positif, sehingga lebih memungkinkan masyarakat menjadi lebih maju. Selain itu program juga diupayakan untuk membantu masyarakat tani yang membutuhkan, dengan pengawasan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani,

maka masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat dibantu dan dimungkinkan program yang dijalankan juga akan tepat sasaran dalam membantu masyarakat petani miskin yang benar-benar membutuhkan. Upaya-upaya pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh juga merupakan kekuatan dari program, karena kemampuan masyarakat dapat berkembang melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang selalu diberikan.

Menurut Hardiyanto (2007), pemberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertakan petani dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses inseminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya.

Aktivitas ekonomi masyarakat dari sebelum adanya program dengan setelah diadakannya program juga sedikit mengalami peningkatan melalui pendampingan penyuluh. Selain itu keberadaan masyarakat dalam naungan Gapoktan menjadi semakin kuat dan memiliki nilai tawar yang semakin tinggi bila dibandingkan harus berdiri secara sendiri-sendiri. Selain memiliki beberapa kekuatan, program PUAP juga memiliki beberapa kelemahan terutama terkait dengan sumber daya manusia serta jumlah anggaran yang terbatas sehingga menyebabkan program menjadi kurang berjalan dengan baik.

Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan. Kelemahan lain dari program ini adalah indikator keberhasilan tidak dirinci berapa lama waktu untuk mencapai indikator tersebut, sehingga keberhasilan program secara jelas juga kurang bisa dilihat sesuai dengan indikatornya. Hal ini karena kecepatan waktu juga menjadi penentu program tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak. Bila program dapat berhasil mencapai indikator pencapaian tetapi dalam jangka waktu relatif lama kurang dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya.

Beberapa kekurangan dari pelaksanaan program tersebut memang suatu realita yang dihadapi oleh pelaksana program. Kekurangan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan Kelurahan Mansapa terkait dengan beberapa kendala utama dalam pelaksanaan program yaitu: Kemajuan dalam ilmu pengetahuan sangat lamban, misalnya penggunaan komputerisasi dalam pelaporan program belum sepenuhnya bisa dilakukan sehingga perkembangan tidak bisa secepat yang diharapkan. Masyarakat lamban dalam menyerap berbagai materi yang telah disampaikan oleh penyuluh, sehingga memerlukan waktu berulang-ulang memberikan materi hingga mampu diserap sepenuhnya oleh masyarakat; Kesulitan mengembangkan usaha produktif bagi masyarakat. Mengubah pemikiran masyarakat bahwa usaha non budidaya cukup menjanjikan agaknya cukup sulit karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa dirinya paling cocok untuk bercocok tanam. (4) Kendala lain yang dihadapi juga terkait dengan lokasi Kelurahan Mansapa yang sebagian wilayahnya terdapat di perbukitan sehingga penyelia mitra tani tidak mampu menjangkau seluruh wilayah desa.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya program PUAP di Desa Kelurahan Mansapa, dikaji baik bersifat positif maupun dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat dengan adanya pelaksanaan program adalah: (1) Membantu pemenuhan modal bagi masyarakat. Masyarakat yang semula mengalami kesulitan dalam permodalan dapat sedikit teratasi dengan adanya bantuan program. Pemenuhan modal bagi masyarakat ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat tani yang semula kekurangan modal usaha, dan harus melaksanakan penanaman maupun pemupukan pada waktu tertentu harus ditunda karena kurangnya modal usaha. Dana bantuan yang diperoleh, masa tanam maupun pemupukan bahkan masa panen dapat dilakukan secara teratur sesuai sapa usaha tani yang dianjurkan bagi masyarakat tani; (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelembagaan kelompok tani: Peran serta masyarakat tani ini dapat dilihat dari antusiasme dan keaktifan ketika diberi materi pendidikan dan pelatihan. Masyarakat juga selalu meningkatkan aktivitas usaha untuk memajukan kelompok-kelompok tani yang menjadi naungannya, misalnya dengan menjalankan usaha bersama yang telah disepakati kelompok tani, mengikuti perlombaan-perlombaan tani, peran serta aktif masyarakat tani dalam setiap pertemuan rutin; (3) Meningkatkan kemampuan petani dalam bidang pertanian dan peternakan: hal ini dapat dilihat dalam kemampuan masyarakat tani yang sebelumnya kurang memahami sapa usaha tani maupun panca usaha tani, menjadi semakin memahami dan mampu menerapkan secara langsung dalam aktivitas pertanian maupun peternakan; (4) Membantu pemenuhan pupuk bagi petani dilihat dari aspek keterjangkauan masyarakat untuk membeli pupuk di kios Gapoktan; (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat ditekankan pada upaya

pendampingan di setiap aktivitas. Sebagian masyarakat telah mampu mengembangkan kegiatan usahanya terutama dengan diversifikasi produk dapat menambah aktivitas pertanian maupun peternakan.

Selain dampak positif tersebut, pelaksanaan program memiliki dampak negatif bagi masyarakat terkait dengan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak memperoleh dana bantuan. Dampak negatif bagi masyarakat ditimbulkan terkait dengan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak memperoleh dana bantuan. Adapun dampak negatif yang lain memang tidak terlihat, sehingga hal tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program memberikan manfaat yang cukup banyak bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hal diatas sesuai dengan Hendayana (2008) bahwa pemberdayaan bertujuan untuk: a) meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/kelemahan yang dimilikinya, c) memperkuat dan mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat pedesaan serta meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat.

Pencapaian pemberdayaan tersebut diatas telah sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan peningkatan ekonomi yang serta tumbuhnya peluang usaha agribisnis lainnya, sehingga masyarakat kelompok tani bisa mengatasi kendala atau hambatan yang ada di daerahnya terutama kendala sumber daya manusia dan letak geografinya. Pencapaian ini pula tidak terlepas dari lembaga-lembaga seperti aparat

pemerintah, gapoktan serta para penyuluh yang membimbing dan memberi arahan terkait dengan program pemberdayaan usaha agribisnis sehingga para anggota kelompok tani bisa membangun ekonomi yang lebih baik.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu:
  - a. Mekanisme: cara-cara penyaluran bantuan yang disusun melalui juknis untuk pemberdayaan masyarakat.
  - b. Sosialisasi: sebelum penyaluran bantuan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan pengembangan agribisnis peternakan.
  - c. Proses pemberi bantuan: setelah proses sosialisasi, bantuan diturunkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan sapi.
  - d. Pendampingan atau penyuluhan: diperlukan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga program tersebut tepat sasaran.

Berdasarkan hasil temuan dan analisa data program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan



Selatan Kabupaten Nunukan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya populasi sapi dan meningkatnya perekonomian masyarakat petani serta bertambahnya minat masyarakat untuk berternak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan antara lain:

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan harus terus dilaksanakan melalui optimalisasi peran kelompok tani sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani dan peternak di Kabupaten Nunukan.
2. Perlunya koordinasi dan komunikasi secara kelembagaan dengan sasaran peningkatan agribisnis di kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
3. Para anggota kelompok tani perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif agar dalam kegiatan penggemukan sapi dapat berjalan dengan baik, sehingga keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan dapat tercapai.
4. Perlu adanya evaluasi secara terbuka terkait dengan penerima bantuan sapi bibit agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (2010). *Hasil Evaluasi Program Pembangunan Peternakan dan Tinjauan Masa Depan Melalui Perspective Analysis*. Dinas pertanian dan kehutanan. <http://disnaksulsel.com>. Diakses pada tanggal 23 April 2016.
- Abipraja (2002). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arifin. (2009). *Pemberdayaan Peternak Sapi Pesisir Garut Selatan Melalui Introduksi Pengetahuan Dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Genetik Ternak*, Bandung, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2011), *Pedoman Pengelolaan Dana Bansos TA. 2011*, Jakarta.
- Hendayana. (2008). *Pemberdayaan Petani-Ternak menuju Kemandirian Melalui Wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama. Bandung.
- Hendayana, R. dan Yusuf. (2003). *Kajian Adopsi Teknologi Penggemukan Sapi Potong Mendukung Pengembangan Agribisnis Peternakan di Nusa Tenggara Timur*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Irawan, Prasetya, (2005), *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta, STIA-LAN Press.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Makalah Power dan Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Pidato Kebudayaan disampaikan pada Peringatan Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta-TIM, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Karsidi. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil*. Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Otoda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, di Semarang.
- Korten, David C. dan Syahrir. (1980). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lenggono P. Setia dkk, (2012), *Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan*. Penerbit Sekretariat Kabupaten Nunukan Bekerjasama Dengan Program Kajian Agraria, LPPM-IPB, Bogor.
- Moleong, Lexy J., (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suradisastra, Kedi. (2008). *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani*. Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No 2 Desember 2008.
- Scott. Cynthia D., dan Dennis, T. Jaffe, (1994). *Empowerment Buliding a Committed Workforce*. Kogan Page Ltd. Pentoville Road London.
- Scott, James C., (1994), *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.
- Syahyuti, (2007). *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor.
- Tarigan, Antonius,(2000). *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Warya, Adang, (2005). *Peranan Penyuluh Pertanian Sebagai Pendidik Petani Dalam Mengembangkan Dinamika Usahatani di Propinsi Banten*, Disertasi, Program Pasacasarjana UNPAD, Bandung.
- Wiati, Catur Budi, S.Hut, (2002), *Beberapa Catatan dari Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan*, Majalah Lembusuana Volume I, No.12, hal. 15-17.
- Wijono, D.B., D.E. Wahyono, P.W. Prihandini,A.R. Siregar, B. Setiadi, dan L.Affandhy. (2003). *Performans Sapi Peranakan Ongole Muda Pascaskrining. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veterinerr*.Pusat Penelitian dan PengembanganPeternakan, Bogor.

## **B. Dokumen**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

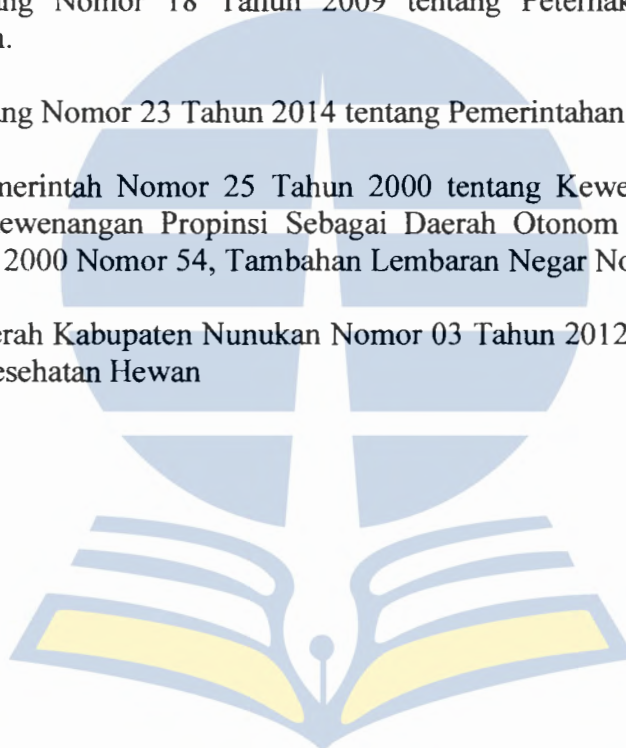
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan





## **DAFTAR INFORMAN**

1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan:
  - a. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
  - b. Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha
  - c. Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak
2. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
3. Kelompok Tani (KT)
  - a. Ketua Kelompok Tani (KKT)
  - b. Anggota Kelompok Tani (AKT)



## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

- A. **Informan:** Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
- B. **Daftar Pertanyaan:**
- **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**
    1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    2. Apa tujuan dari program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    3. Darimana sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    4. Apa saja persyaratan masyarakat untuk menjadi anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    5. Bagaimana proses sosialisasi dan seleksi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    6. Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, desa, kecamatan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan?
    7. Bagaimana proses pemberian bantuan kepada anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    8. Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    9. Siapa saja atau instansi apa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

10. Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
11. Dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, apakah tahapan tersebut sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan?
12. Apa saja pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
13. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
14. Berapa nominal bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
15. Bagaimana peran aparat setempat dalam pembentukan kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
16. Berapa banyak jumlah kelompok tani yang ada di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
17. Berapa jumlah anggota setiap kelompok tani dalam setiap kelompoknya?
18. Bagaimana struktur organisasi dan pengurusan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
19. Kegiatan apa saja yang dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan ini dapat berjalan sesuai harapan?
20. Siapa saja yang memberikan pelatihan atau penyuluhan pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
21. Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
22. Berapa lama waktu penyuluhan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
23. Lembaga apa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
24. Bagaimana peran petugas penyuluh lapangan?
25. Apa tujuan diadakannya penyuluhan?
26. Darimana petugas penyuluhan lapangan diambil?



27. Seberapa efektif petugas penyuluh lapangan bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
28. Apa saja tugas yang diemban oleh petugas penyuluh lapangan?
29. Bagaimana realisasi hasil dari adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

- **Pencapaian Pogram Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Apa saja indikator atau ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
2. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini, apakah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
4. Bagaimana harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani?



## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

- A. **Informan:** Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
- B. **Daftar Pertanyaan:**
- **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**
    1. Seauhmana keterlibatan aparat setempat dalam proses awal program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    2. Bagaimana proses yang ditempuh untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    3. Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, pihak Desa, pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan?
    4. Bagaimana bentuk penyuluhan/pembinaan/pelatihan yang diberikan kepada anggota kelompok tani?
    5. Siapa yang memberikan penyuluhan/pembinaan/pelatihan kepada anggota kelompok tani?
    6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
    7. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani?
    8. Berapa nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing kelompok tani?
    9. Bagaimana peran kepala desa dalam proses pembentukan kelompok tani?
    10. Berapa banyak jumlah anggota untuk satu kelompok tani?
    11. Kegiatan apa yang dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dapat berjalan sesuai dengan harapan?
    12. Seauhmana peran petugas penyuluh lapangan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

13. Apa tujuan adanya petugas penyuluh lapangan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
14. Darimana petugas penyuluhan lapangan diambil?
15. Apa saja tugas yang diemban oleh petugas penyuluh lapangan?
16. Bagaimana bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh lapangan?

• **Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini, apakah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
3. Bagaimana harapan ke depan agar pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani?

Informan,  
Petugas Penyuluh Lapangan  
(PPL)



M. Ramli, SP

## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

A. **Informan:** Kelompok Tani (KT)

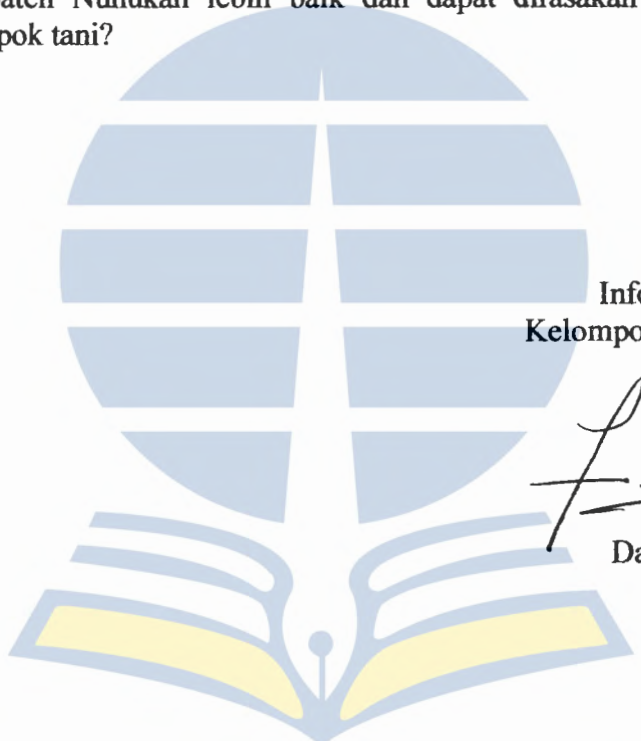
B. **Daftar Pertanyaan:**

• **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

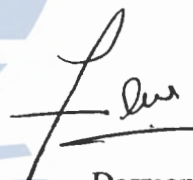
1. Bagaimana mekanisme yang saudara ketahui dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan yang diselenggarakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimana menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota kelompok tani?
3. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
4. Siapa yang memberikan penyuluhan/pembinaan/pelatihan kepada anggota kelompok tani?
5. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani?
6. Berapa nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing kelompok tani?
7. Berapa banyak jumlah anggota untuk satu kelompok tani?
8. Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
9. Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
10. Berapa jumlah kelompok tani di Kelurahan Mansapa dan apa nama-namanya?
11. Usaha apa saja yang dilakukan oleh kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
12. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penggemukan sapi?

- **Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini, apakah sudah menunjukkan kemajuan yang berarti?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
3. Bagaimana harapan ke depan agar pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani?



Informan,  
Kelompok Tani (KT)

  
Darman

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Kelompok Tani  
 Nama : Arifuddin  
 Jabatan : Anggota Kelompok Tani

#### **A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Kurang tahu
2. Cara menentukan yang berhak menjadi anggota kelompok tani adalah dengan rapat anggota kelompok yang didampingi oleh perangkat desa dan juga petugas penyuluh lapangan.
3. Proses sosialisasi yang dilakukan Dispertanak Kabupaten Nunukan dengan menghadiri rapat desa dan mendatangi petani/peternak untuk melakukan sosialisasi program.
4. Yang memberikan penyuluhan adalah petugas penyuluh lapangan, yang melakukan pembinaan dan pelatihan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
5. Bantuannya berupa Bibit Sapi Bali.
6. Bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit ternak 2 ekor/KK dan bibit hijauan makanan ternak 1 paket, kalau di nominalkan saya kurang tahu.
7. Jumlah anggota 20 orang
8. Materi: pemeliharaan, perawatan, produksi pakan ternak, produksi ternak, pengolahan limbah ternak, dan kesehatan ternak.
9. Satu tahun
10. Tidak hafal
11. Usaha peternakan, pertanian, perkebunan.
12. Kendala: harga pakan konsentrat relatif mahal.

#### **B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Kemajuan berupa jumlah ternak yang semakin banyak. Peningkatan populasi ternak.
2. Faktor yang menghambat: kurangnya pemahaman peternak terhadap teknologi penerapan tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi lagi demi peningkatan SDM petani peternak.
3. Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan SDM peternak. Diperlukan peran aktif dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam mensosialisasikan, membina dan memberikan pelatihan kepada kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan beternak agar bantuan dari pemerintah bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya.

Informan,  
Anggota Kelompok Tani



Arifuddin



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Kelompok Tani  
Nama : Yoktan R. Oranay  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo

#### A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui agribisnis peternakan yaitu pada tahap awal mengajukan proposal permohonan bantuan selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi serta penentuan calon penerima dan calon lokasi.
2. Anggota kelompok tani ditentukan berdasarkan tingkat kesanggupan peternak dalam memelihara dan merawat ternak baik secara individu maupun secara berkelompok, memiliki lahan penanaman hijauan makanan ternak dan bersangkutan berada pada lokasi atau wilayah binaan dari PPL setempat.
3. Proses sosialisasi dilakukan melalui pertemuan kelompok secara rutin, memberi penjelasan tentang tata cara memelihara ternak yang baik
4. Penyuluhan/pembinaan/pelatihan dilakukan oleh petugas teknis dari provinsi atau kabupaten/kota dan didampingi oleh PPL setempat.
5. Bentuk bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berupa bibit ternak, bibit hijauan makanan ternak dan obat-obatan ternak.
6. Nominal bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit ternak 2 ekor/KK dan bibit hijauan makanan ternak 1 paket.
7. Jumlah anggota kelompok untuk setiap kelompok tani yaitu 10-12 KK.
8. Jenis materi yang diberikan dalam pemantapan pemberdayaan agribisnis peternakan yaitu teknik memelihara ternak, penerapan teknologi tepat guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan hijauan makanan ternak.
9. Waktu yang dibutuhkan dalam pemantapan kegiatan tersebut yaitu 1-2 tahun setelah terima bantuan.
10. Jumlah kelompok tani di kelurahan Mansapa sebanyak 4 kelompok tani.
11. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu pekerjaan pokok melalui budidaya rumput laut serta pekerjaan sampingan dengan beternak, berkebun, bertani, tukang bangunan.
12. Kendala yang dihadapi dalam proses penggemukan sapi diantaranya kurangnya pengetahuan peternak dalam penggemukan sapi, ternak dipelihara tanpa dikandangkan, kurangnya penggunaan suplemen nutrisi untuk penggemukan serta kurangnya penanaman HMT unggul.



## **B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Pengembangan agribisnis peternakan di kelurahan Mansapa sudah menunjukkan kemajuan yang berarti tetapi masih ada kendala yang dihadapi khususnya dalam hal pengelolaan hijauan makanan ternak pada musim kemarau.
2. Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa yaitu masyarakat lebih fokus pada mata pencaharian pokok melalui budidaya rumput laut serta kurangnya pemahaman dan keterlibatan keluarga.
3. Harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya bagi anggota kelompok tani yaitu:
  - a. Perlu keterlibatan semua anggota kelompok tani
  - b. Bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran
  - c. Kelompok tani calon penerima bantuan harus diseleksi lebih ketat.

Informan,  
Ketua Kelompok Tani  
Gelegat Lewo

  
Yoktan R. Oranay

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)  
Nama : Nirwana, S.Pt. M.Si.  
Jabatan : Penyuluh

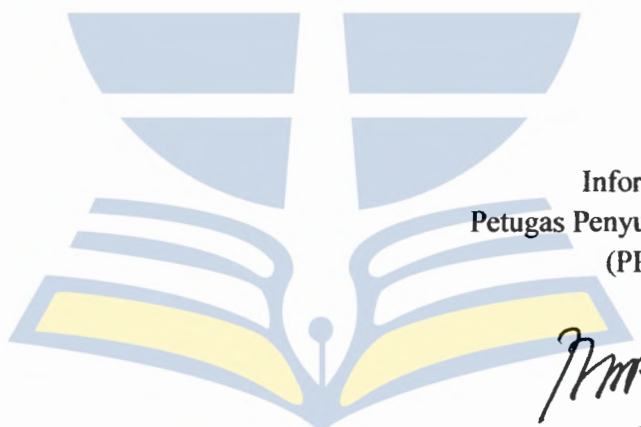
#### A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Keterlibatan aparat dalam proses awal program pemberdayaan disambut baik oleh masyarakat dengan penuh antusias terutama aparat pemberi bantuan dengan calon penerima bantuan.
2. Proses penentuan calon penerima bantuan yang dianggap mampu dan layak menerima bantuan yaitu melalui pertemuan rutin dan mengajukan persyaratan yang harus ditaati.
3. Proses koordinasi yang dilakukan masing-masing pihak atau instansi terkait yaitu dengan membuat pelaporan perkembangan kelompok atau kesiapan kelompok tani penerima.
4. Penyuluhan dilakukan secara rutin kepada anggota kelompok tani dan difasilitasi oleh PPL setempat.
5. Penyuluhan dilakukan oleh PPL yang telah diberikan tugas oleh dinas terkait sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah binaan.
6. Kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan yaitu masyarakat lebih fokus pada mata pencaharian pokok sebagai petani rumput laut dan untuk memelihara ternak hanya sebagai usaha sampingan selain sistem bagi hasil atau perguliran belum dipahami sepenuhnya oleh anggota kelompok tani.
7. Jenis bantuan yang diberikan oleh Dispertanak kabupaten nunukan yaitu memberikan bantuan bibit ternak, sarana pengolahan limbah ternak, bibit hijauan makanan ternak, dan bantuan finansial.
8. Nominal bantuan yang diberikan untuk bibit ternak sebanyak 2 ekor /KK dan sarana pengolahan limbah ternak 1 unit serta bibit hijauan makanan ternak sebanyak 1 paket.
9. Peranan Kepala Desa dalam proses pembentukan kelompok tani pada dasarnya adalah ikut mendukung dalam rangka pembangunan agribisnis peternakan.
10. Jumlah anggota setiap kelompok tani yang terbentuk sebanyak 12 KK/KT
11. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan agribisnis peternakan yaitu memberikan bantuan bibit ternak, memberi penyuluhan dan pembinaan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
12. Peranan petugas PPL dalam pengembangan agribisnis peternakan yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan atau pemahaman tentang cara beternak yang baik untuk kesejahteraan anggota

13. Tujuan diikutsertakan PPL dalam pembangunan agribisnis peternakan yaitu sebagai wadah aspirasi peternak dalam menyampaikan ide dan gagasan atau usulan kepada pemerintah .
14. Petugas penyuluh lapangan berasal anggota PNS/Non PNS yang diberikan tugas sesuai tupoksi yang diberikan dari dinas terkait.
15. Tugas yang diemban oleh petugas PPL yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan, memberikan pemahaman dalam budidaya ternak, melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan pemerintah.
16. Bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh PPL yaitu membuat kegiatan harian atau bulanan yang selanjutnya direkap untuk dilaporkan ke atasan atau dinas terkait.

**B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Menurut saya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dimana populasi ternak semakin bertambah.
2. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pemahaman peternak terhadap teknologi tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi yang intens demi peningkatan SDM peternak.
3. Harapan saya kedepan diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk peningkatan SDM petani peternak agar bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya.



Informan,  
Petugas Penyuluh Lapangan  
(PPL)



Nirwana, S.Pt. M.Si

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### **ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN**

Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan  
Nama : Ir. Desi Toding Datu, M.Si.  
Jabatan : Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

#### **A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan dilakukan dengan pemberian bantuan bibit sapi melalui kelompok tani.
2. Tujuan program tersebut adalah melalui pemberian bibit ternak sapi bali diharapkan anggota kelompok tani/ternak dapat mengembangkan jumlahnya dan dimanfaatkan sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan cara menjual hasil ternaknya jika ada keperluan mendesak seperti pendaftaran anak sekolah atau biaya perawatan rumah sakit.
3. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan
4. Syarat masyarakat untuk menjadi anggota kelompok adalah identitas diri berupa KTP dan KK yang masih berlaku. Domisili anggota bisa berdasarkan kedekatan lokasi/hamparan tempat lokasi kegiatan, atau berdasarkan kedekatan domisili.
5. Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat membentuk kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan, sedangkan proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima bantuan adalah dengan bertatap muka secara langsung dengan anggota kelompok tani yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan ke Dinas Peternakan Kab./Kota terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kemudian melakukan wawancara dengan para anggota kelompok tani terkait hal-hal mengenai tata cara beternak untuk mengetahui kesiapan dan kelayakan para anggota menerima bantuan. Selain itu, petugas CPCL juga mengumpulkan informasi-informasi terkait anggota kelompok tani calon penerima dari PPL dan aparat desa setempat.

6. Kalau ada kegiatan yang berupa bantuan, Dinas memberitahukan kepada PPL untuk disosialisasikan kepada kelompok tani. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan atas rekomendasi kepala desa dan camat setempat. Jika kelompok tani tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan, dalam penyerahannya Dinas memberitahukan kepada desa dan camat. Selain itu dalam musrembang Dinas melakukan sosialisai terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti paket bantuan apa yang akan diberikan kepada masyarakat.
7. Petani mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, cq. Kadis dispertanak, kemudian Dinas mempelajari proposal-proposal yang diusulkan oleh kelompok tani, dan mengecek kelengkapan administrasi, kemudian melakukan CP/CL untuk mecegah adanya kelompok tani fiktif juga untuk mengetahui kesiapan para kelompok tani dalam menerima paket bantuan yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut diats Dinas akan menilai kelompok mana yang patut/layak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Setelah ditetapkan, maka dibuatkan SK penerima bantuan.
8. Dari pihak Dispertanak biasanya penanggung jawab kegiatan ataupun siapa saja yang pendidikannya memiliki beground dibidang peternakan melakukan kunjungan langsung dilapangan (penerima bantuan) dan saling berdiskusi dua arah, dimana petani menyampaikan keluhan berupa hambatan ataupun sesuatu yang mereka anggap suatu keberhasilan kepada petugas tersebut, kemudian diberikan masukan oleh petugas tersebut. Untuk pelatihannya sendiri kami (dispertanak) juga mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan peternak, berupa BIMTEK misalnya.
9. Kalau siapa saja, ya seluruh stakeholder tentunya, tetapi yang lebih berperan adalah Dispertanak dan Badan ketahanan Pangan
10. Kendala yang dihadapi : tidak ada kendala yang berarti
11. Apakah tahapan Perencanaan program sudah sesuai? Ya sudah sesuai, kita lakukan pengkajian terhadap potensi ysng dimiliki untuk mengembangkan agribisnis peternakan.
12. Pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan: Pertimbangannya: diwilayah tersebut memiliki populasi ternak (sapi) yang tinggi, akses untuk pemasaran mudah dan akses sumber modal gampang
13. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kab. Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi buatan.
14. Bantuan ke kelompok tani sebanyak 2 ekor/KK dengan jumlah anggota 20-25 orang/ kelompok tani.

15. Peran aparat setempat sangat mendorong warganya agar mereka dapat membentuk kelompok, hal ini didasarkan karena dengan kelompok tani harapan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah lebih besar
16. Jumlah kelompok tani di Kelurahan Mansapa ada 4 kelompok tani.
17. Jumlah anggota setiap kelompok minimal 25 orang.
18. Struktur organisasi terdiri dari pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) dan anggota kelompok, untuk kepengurusannya berdasarkan AD/ART kelompok tersebut
19. Penyuluhan dan juga pelatihan-pelatihan. Terkadang juga diberikan bantuan tambahan penunjang untuk keberlangsungan usaha tersebut
20. Penyuluh yang wilayah tugasnya di Kelurahan Mansapa penyuluh tersebut yang senantiasa aktif memberikan pengarahan. Selain penyuluh tersebut Disperanak juga aktif memberikan masukan khususnya dalam membina kelompok penerima
21. Masalah teknis dan masalah administrasi
22. Enam (6) bulan
23. Perbankan
24. Sangat membantu sekali dalam pelaksanaan program tersebut
25. Memberikan edukasi kepada petani
26. Dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan
27. Sangat efektif, karena dengan bantuan penyuluh, program tersebut bisa berjalan dengan baik.
28. Memberikan pengarahan, masukan dan solusi terhadap problem yang dialami oleh petani penerima bantuan
29. Realisasi hasil dari program tersebut 100% baik.

#### **B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Indikator keberhasilan: Bertambahnya warga yang menjadikan agribisnis peternakan sebagai usahanya, adanya nilai tambah/pendapatan yang diterima oleh peternak (pendapatan petani makin tinggi), terbentuknya usaha lain yang terkait dengan agribisnis peternakan.
2. Sejauh ini kami belum puas dengan hasil yang dicapai karena yang kami inginkan adalah terbentuknya rantai usaha antara satu dengan yang lain sangat terkait. Sebagai contoh agribisnis usaha penggemukan sapi, yang kami harapkan disini bisa terbentuk suatu usaha yang mendukung usaha penggemukan tersebut, seperti tumbuhnya usaha masyarakat yang menyediakan pakan konsentrat. Tapi sekarang ini belum terwujud

3. Faktor yang menjadi penghambat: Sumber bahan baku pendukung dan odal tambahan, untuk kelanjutan program bantuan
4. Harapan kedepan terhadap program agribisnis peternakan ini etap dijalankan tetapi dengan memperbaiki kekurang-kurangan dan masalah yang dihadapi selama ini.

Informan,  
Kabid Produksi dan  
Sumberdaya Ternak



Ir. Desi Toding Datu, M.Si.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan  
 Nama : Junaidi, SP.  
 Jabatan : Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha

#### **A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

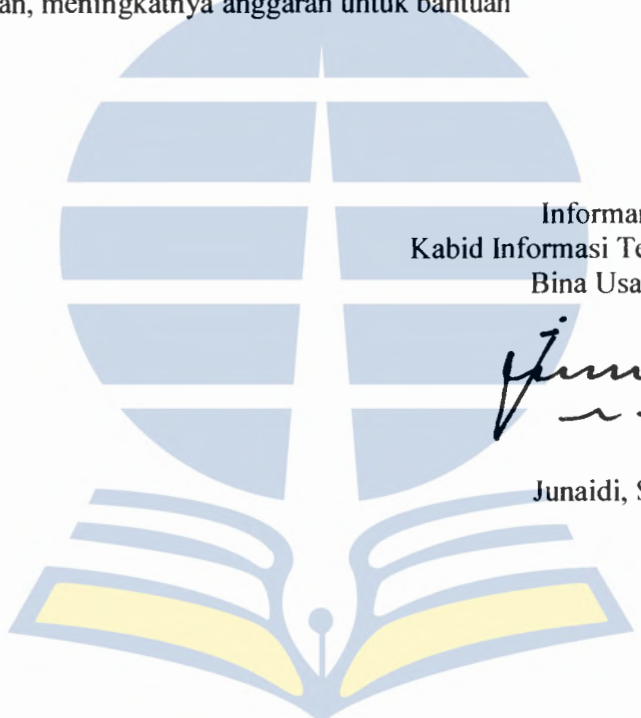
1. Melalui usulan dari kelompok tani kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dispertanak Kab. Nunukan.
2. Meningkatkan SDM petani/peternak dan kesejahteraannya
3. APBD Kabupaten Nunukan, APBD Provinsi Kalimantan Utara dan APBN
4. Pertama tentu saja pekerjaannya sebagai petani/pekebun dan punya lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk usaha peternakan
5. Sosialisasi dan seleksi umumnya dilakukan oleh petugas dinas, juga dibantu petugas penyuluh. Pelaksanaan seleksi biasanya dimulai dari hal administrasi, kemudian pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian data, dilanjutkan dengan penilaian.
6. Koordinasi bisa dilakukan dengan kunjungan, bisa juga dengan memanfaatkan fasilitas telekomunikasi
7. Usulan bantuan dari kelompok tani akan diseleksi dan dilakukan penilaian, selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan, dan dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana mestinya.
8. Melalui penyuluhan, sosialisasi dan pembuatan demplot
9. Dispertanak, Badan Ketahanan Pangan/Penyuluhan, Dinas Peternakan Provinsi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelompok tani
10. Jumlah anggaran, SDM, dan geografis
11. Tidak tahu
12. Kebutuhan, RPJM, visi dan misi pembangunan peternakan
13. Bibit ternak sapi, kambing
14. Tidak tahu
15. Membina keorganisasian kelompok tani
16. Tidak tahu
17. 20-25 orang
18. Tidak tahu
19. Pembinaan, pengawasan, pelayanan, pelatihan
20. Petugas dinas, penyuluh
21. Budaya, teknologi tepat guna, kesehatan hewan
22. Relatif



23. Dispertanak, Badan Ketahanan Pangan/Penyuluhan, Dinas Peternakan Provinsi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelompok tani
24. Aktif
25. berbagi informasi, wawasan, pengalaman, penguatan kelembagaan
26. BKP3D
27. Cukup efektif
28. Pembinaan, pengawasan, pelayanan, pelatihan
29. Peningkatan populasi ternak, peningkatan kesejahteraan peternak

**B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Populasi ternak, ekonomi mikro petani
2. Cukup berarti, tapi belum sesuai harapan yang ideal
3. SDM, anggaran, koordinasi
4. Meningkatnya kreatifitas kelompok tani, meningkatnya peran penyuluh lapangan, meningkatnya anggaran untuk bantuan



Informan,  
Kabid Informasi Teknologi dan  
Bina Usaha



Junaidi, SP

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan  
 Nama : Ir. Jabbar, M.Si  
 Jabatan : Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan

#### **A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan dilakukan dengan pemberian bantuan bibit sapi melalui kelompok tani.
2. Tujuan program tersebut adalah melalui pemberian bibit ternak sapi bali diharapkan anggota kelompok tani/ternak dapat mengembangkan jumlahnya dan dimanfaatkan sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan cara menjual hasil ternaknya jika ada keperluan mendesak seperti pendaftaran anak sekolah atau biaya perawatan rumah sakit.
3. Sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I) yang pada waktu itu adalah melalui Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan sejak tahun 2013 berpindah melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (APBD II) melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
4. Persyaratan masyarakat untuk dapat menjadi anggota kelompok tani dalam program tersebut adalah mempunyai KTP dengan domisili yang sama dengan kelompok tani yang sama, mempunyai lahan/tempat untuk penggembalaan ternak, mempunyai kandang atau bersedia membuat kandang sapi serta mempunyai pengalaman dalam hal beternak terutama ternak sapi.
5. Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat membentuk kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan, sedangkan proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima bantuan adalah dengan bertatap muka secara langsung dengan anggota kelompok tani yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan ke Dinas Peternakan Kab./Kota terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kemudian melakukan wawancara dengan para anggota kelompok tani terkait hal-hal mengenai tata cara beternak untuk mengetahui kesiapan dan kelayakan para anggota menerima bantuan.

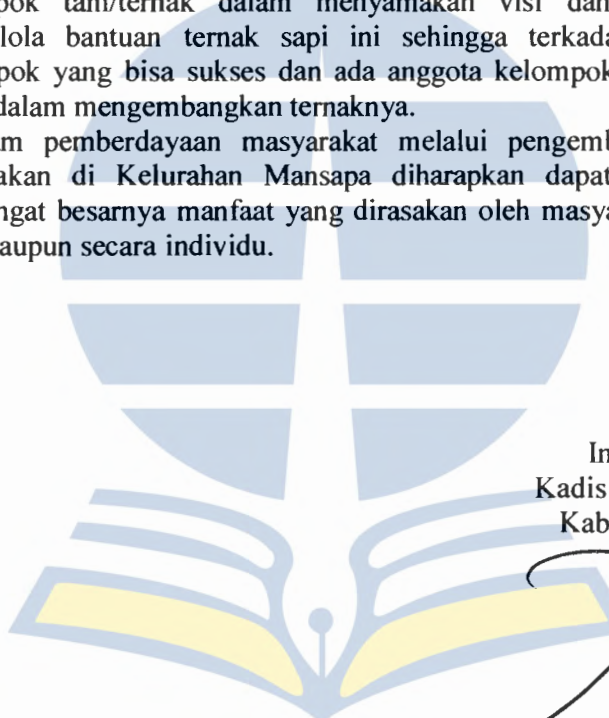
- Selain itu, petugas CPCL juga mengumpulkan informasi-informasi terkait anggota kelompok tani calon penerima dari PPL dan aparat desa setempat.
6. Proses Koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, aparat desa dan pihak kecamatan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dilakukan pada saat kunjungan petugas CPCL pada saat seleksi calon penerima bantuan ternak dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan secara kontinyu hingga kelompok tani dinyatakan layak menerima bantuan dan bantuan sapi bibit sampai ditangan peternak.
  7. Proses pemberian bantuan dilakukan setelah proses CPCL dan verifikasi dilakukan hingga diperoleh jumlah kelompok tani/ternak sesuai dengan yang tertera dalam anggaran. Bantuan sapi bibit yang diberikan pada umumnya berjumlah 2 ekor sapi betina untuk setiap anggota kelompok dan 1 ekor sapi pejantan untuk ketua kelompok atau anggota kelompok tani yang dianggap mampu memelihara sapi pejantan atau anggota kelompok tani yang lokasi berada di tengah-tengah anggota kelompok tani lain sehingga jika nantinya ada sapi betina yang birahi, sapi pejantan tersebut dapat digiring ke kandang sapi betina yang birahi tersebut.
  8. Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok tani penerima bantuan adalah dengan melakukan kunjungan secara terjadwal kepada kelompok tani, untuk memberikan penyuluhan tentang tata cara beternak yang baik meliputi cara pemberian pakan sesuai kebutuhan ternak, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit/gangguan kesehatan ternak secara sederhana, cara pertolongan pertama jika ada ternak yang sakit; melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). Pelatihan yang diberikan kepada peternak salah satunya adalah pelatihan pengolahan pakan ternak sederhana dan pelatihan pengolahan kotoran ternak untuk pupuk kandang atau biogas serta ada beberapa anggota kelompok tani/ternak yang dikirim pelatihan sebagai petugas IB.
  9. Instansi yang terkait dengan program ini adalah Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kab./Kota, Camat, Aparat Desa/Kelurahan, PPL serta Satpol PP.
  10. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan akses jaringan internet yang mempengaruhi proses pengajuan e-proposal, kesulitan menjangkau daerah-daerah yang terbatas transportasinya, keterbatasan kemampuan kelompok tani dalam berbahasa Indonesia sehingga menghambat proses CPCL.
  11. Perencanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  12. Pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan ke suatu daerah adalah potensi wilayah meliputi luas lahan penggembalaan, SDM calon penerima meliputi pengalaman beternak; pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; kemampuan mendeteksi birahi ternak; akses transportasi yang memudahkan pengawasan dan pembinaan kelompok tani/ternak.
  13. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kab. Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi

- Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi buatan. Bantuan bidang pertanian berupa bantuan bibit hortikultura, bibit durian, alat pertaniandan optimalisasi lahan.
14. Nominal bantuan yang diberikan adalah sebanyak 2 ekor/kk dengan jumlah anggota 20-25 anggota/kelompok tani.
  15. Peran aparat dalam membentuk kelompok tani adalah memfasilitasi proses pembentukan kelompok melalui musyawarah.
  16. Jumlah kelompok tani yang ada di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan ada 4 kelompok tani.
  17. Jumlah anggota kelompok tani dalam setiap kelompok tani adalah minimal 25 orang
  18. Struktur organisasi dan pengurusan yang ada dalam kelompok tani/ternak adalah terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
  19. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah program monitoring dan pembinaan kelompok tani.
  20. Pelatihan atau penyuluhan yang diberikan kepada para anggota kelompok tani adalah pelatihan pengolahan pakan ternak secara sederhana dan beberapa anggota kelompok tani yang dikirim pelatihan petugas IB.
  21. Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah cara pengolahan pakan ternak berbahan jerami padi secara sederhana yaitu dengan metode amoniasi dan pembuatan silase, sedangkan pada pelatihan petugas IB materi yang diberikan adalah pengetahuan deteksi birahi dan pelaksanaan IB.
  22. Pelatihan pengolahan pakan ternak dilaksanakan selama 3 hari sedangkan pelatihan IB bagi kader dilaksanakan selama 21 hari.
  23. Lembaga yang terlibat dalam pelatihan IB bagi kader adalah BBIB Singosari, Malang sedangkan untuk pelatihan pengolahan pakan ternak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
  24. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) berperan sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut.
  25. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan peternak tentang tata cara pengolahan pakan ternak, pemberian pakan ternak yang baik, tanda-tanda birahi ternak serta tata cara pelaksanaan IB.
  26. Petugas Penyuluh Lapangan berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan.
  27. PPL sangat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian ternak sapi bibit karena dapat bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan ini.
  28. PPL bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi proposal yang diajukan kelompok tani, menyeleksi kelengkapan administrasi proposal, memfasilitasi proses CPCL hingga penyerahan bantuan ternak serta membantu pengawasan perkembangan ternak bantuan sapi.
  29. Bantuan sapi bibit yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan peternak karena dengan adanya sapi-sapi tersebut yang telah berkembang biak dapat disimpan sebagai cadangan dana untuk keperluan penting seperti pendidikan anak, biaya

perawatan rumah sakit atau untuk acara keluarga serta dapat dijadikan modal usaha.

**B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan**

1. Indikator keberhasilan dari program ini yang paling mudah diukur adalah peningkatan populasi sapi di Kabupaten Nunukan secara umum dan di Kelurahan Mansappa secara khusus, selain itu ada peningkatan pengetahuan petani tentang cara pengolahan pakan, cara pengolahan limbah, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit ternak dan pengobatannya secara sederhana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambah banyak anak petani/peternak yang bisa kuliah.
2. Kemajuan yang ditunjukkan sangat berarti yaitu dapat dilihat dari semakin banyaknya minat masyarakat untuk beternak sapi.
3. Faktor penghambat program ini antara lain kurang kompaknya anggota kelompok tani/ternak dalam menyamakan visi dan misinya dalam mengelola bantuan ternak sapi ini sehingga terkadang ada anggota kelompok yang bisa sukses dan ada anggota kelompok tani/ternak yang gagal dalam mengembangkan ternaknya.
4. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa diharapkan dapat ditindak lanjuti mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik secara luas maupun secara individu.



Informan,  
Kadis Dispertanak  
Kab. Nunukan



Ir. Jabbar, M.Si